



**BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP) DALAM PERSPEKTIF BERITA
DARING: ANALISIS CDA DI KOMPAS DAN JAWAPOS**

*WOMEN MIGRANT WORKERS (WMW) IN THE DARING NEWS
PERSPECTIVE : CDA ANALYZE IN KOMPAS AND JAWAPOS*

SKRIPSI

Oleh:

SULISTIANINGSIH

NIM. (150910302029)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



**BURUH MIGRAN PEREMPUAN(BMP) DALAM PERSPEKTIF BERITA
DARING: ANALISIS CDA DI KOMPAS DAN JAWAPOS**

***WOMEN MIGRANT WORKERS (WMW) IN THE DARING NEWS
PERSPECTIVE : CDA ANALYZE IN KOMPAS AND JAWAPOS***

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk
menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan meraih gelar sarjana
Sosial**

Oleh:

SULISTIANINGSIH

NIM. (150910302029)

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : SULISTIANINGSIH

NIM : 150910202029

Program Studi : Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis ilmiah (Skripsi) ini adalah hasil Penelitian yang telah dilakukan sendiri selama 4 bulan (Januari s/d April 2019) di Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com, bukan hasil jiplakan dan belum pernah ditetapkan sebagai karya tulis pada institusi manapun.

Kami yang membuat pernyataan

Jember, 10 April 2019

SULISTIANINGSIH
NIM. 150910302029

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat dan kasih sayangnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya, Ibunda Murtiani dan Ayahanda Hariyanto yang telah membesarkan saya memberikan dukungan baik moril maupun materil yang tidak pernah saya bisa balas dalam hal apapun, semoga dengan terselesaikannya skripsi ini beliau bangga dengan perjuangan saya selama ini.
2. Almamater saya yang tercinta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu; Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa.”
(QS. AL Baqarah:216)

“Never Accept Rejection As Failure”
Tidak pernah menerima penolakan sebagai kegagalan
(Huang zitao)

“Fate isn’t Fearfull it’s just unpredictable, that’s why we scared for all possibilities”
Takdir tidak menakutkan itu hanya tidak terduga, itulah kenapa kita takut akan semua kemungkinan
(anonime)

SKRIPSI

**BURUH MIGRAN PEREMPUAN (BMP) DALAM PERSPEKTIF BERITA
DARING: ANALISIS CDA DI KOMPAS DAN JAWAPOS**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan meraih gelar sarjana Sosial

Oleh:

SULISTIANINGSIH

NIM. (150910302029)

Dosen Pembimbing:

Raudlatul Jannah, S.Sos., M.Si.

NIP. 198206182006042001

RINGKASAN

Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam Berita Daring: Analisis CDA di Kompas dan Jawapos; Sulistianingsih; 150910302029;273 Halaman; Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Latarbelakang yang melandasi dilakukannya penelitian ini tidak terlepas dari peranan media pemberitaan dalam mengkonstruksi identitas Buruh Migran Perempuan. Selain itu, keberadaan dan pekerjaan Buruh Migran Perempuan masih dianggap bertentangan dengan nilai dan norma sosial serta lekat dengan stigma buruk dimata masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka penting untuk mengkaji permasalahan mengenai bagaimana media mengkonstruksi identitas Buruh Migran Perempuan, mengapa identitas Buruh Migran Perempuan dikonstruksi secara demikian oleh media pemberitaan dan bagaimana komparasi dari kedua media pemberitaan dalam mengkonstruksi Buruh Migran Perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkomparasikan konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam pemberitaan media massa Kompas.com dan Jawapos.com. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemosisian subjek dan penulis dan khalayak dengan perspektif feminis Sara Mills. Sesuai dengan teori yang digunakan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Kritis Sara Mills.

Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa Komparasi media pemberitaan antara Kompas.com dan Jawapos.com menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan struktur dan pola pemberitaan yang berbeda, seperti: gaya pemberitaan, konteks bahasa serta pemosisian subjek-objek, posisi negara, pemosisian penulis-pembaca, mediasi dan kode budaya yang ada dalam berita. Terlebih lagi, Identitas Buruh Migran Perempuan mutakhir merupakan hasil konstruksi dari media pemberitaan. Kenyataan bahwa Buruh Migran Perempuan tidak pernah absen diberitakan dalam laman Kompas.com dan Jawapos.com menjadi fakta yang tidak terbantahkan jika media pemberitaan tersebut memiliki kecenderungan untuk mengkonstruksi Identitas Buruh Migran

Perempuan. Lebih lanjut, Berita kompas.com dan Jawapos.com didominasi oleh kriminalitas dan seksualitas, politik dan kebijakan serta permasalahan keluarga Buruh Migran Perempuan. Ketiga wacana dominan dalam media pemberitaan tersebut secara tidak langsung memiliki agenda untuk mewacanakan dan membentuk figur dari Buruh Migran Perempuan sebagai pelaku tindak kriminal, babu dan objek. Sedangkan alasan mengapa media melakukan konstruksi yang demikian dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: budaya patriarki, kepentingan media, dan perkembangan isu atau realita di masyarakat.

Media pemberitaan menampilkan Buruh Migran Perempuan dengan netral tanpa keberpihakan dan cenderung objektif, tetapi tidak bisa dipungkiri jika pemberitaan yang disampaikan dapat mengkonstruksi identitas Buruh Migran Perempuan. Perlu diketahui jika cara media pemberitaan menampilkan dan memposisikan Buruh Migran Perempuan akan menjadi konstruksi sosial yang kemudian diadopsi oleh masyarakat untuk melihat dan memperlakukan BMP sebagai bentuk dari praktik sosial.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “*Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam Perspektif Berita Daring: Analisis CDA di Kompas dan Jawapos*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik pada:

Hari : Kamis, 4 Juli 2019

Jam : 09.00 WIB s.d selesai

Tempat: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Nurul Hidayat S.Sos., MUP
NIP: 197909142005011002

Raudlatul Jannah S.Sos., M.Si
NIP: 198206182006042001

Anggota Tim Penguji

Anggota 1

Anggota 2

Dien Vidia Rosa S.Sos. MA
NIP: 198304042008121003

Lukman Wijaya Baratha, S.Sos., M.A.
NIP: 760016803

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Jember

Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP: 196106081988021001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “*Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam Berita Daring: Analisis CDA di Kompas dan Jawapos*” Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Drs. Joko Mulyono, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Raudlatul Jannah S.Sos., M.Si, selaku dosen pembimbing dan motivator terbaik yang telah dengan sabar dan pengertian meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk terus membimbing dan memberikan motivasi yang berharga bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Nurul Hidayat S.Sos., MUP, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama penulis menjadi mahasiswa sosiologi.
5. Lukman Wijaya Baratha, S.Sos., M.A., yang telah memberikan pengarahan baik berupa kritik maupun saran membangun yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dien Vidia Rosa, S.Sos., M.A., yang telah memberikan pengarahan baik berupa kritik maupun saran membangun yang bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Semua dosen pengajar Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa sosiologi.

8. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan material, moral dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kebanggaan.
9. Farida Dwi Anggraini, Sahabat seperjuangan dalam hidup. Saudara yang setia menemani dalam keadaan susah maupun senang, memberi alasan dan dukungan untuk bangkit.
10. Budiarti Sentono Putri, partner *single fighter*. Terimakasih untuk banyak hal.
11. Sahabat dan saudara seperjuangan, Ita purnamasari, Mardiana Wulansari, Riska Dwi Setiaini, Zulfa Ulinuha Mustika Zahro, Fariq Wariqul Jannah, Hastin Atmiasih, Ucha Jaya Sucipta, Lisa Meyliani, Isnatul Muallifin, Rina Dwi Lestari dan Radha Leela Krisna Murthy serta beberapa dari mereka yang pernah singgah kemudian pergi. Terimakasih telah menetap dan menemani dari titik terendah sampai saat ini semoga dilain kesempatan bisa dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat dan sukses tanpa kurang suatu apapun.
12. Seluruh rekan dan teman Mahasiswa Sosiologi khususnya angkatan 2015.
13. Rekan, partner, dan keluarga besar dari BEM FISIP UNEJ yang telah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang berharga dalam berproses di dalam organisasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu kritik dan saran yang membangun bagi skripsi ini selalu diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi pembaca.

Jember, 25 juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
RINGKASAN.....	vii
PENGESAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latarbelakang	1
1.2 Rumusan Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Konseptual	10
2.1.1 Konstruksi Media Massa.....	10
2.1.2 Identitas.....	12
2.1.3 Buruh Migran Perempuan (BMP).....	12
2.2 Kerangka Teori	13
2.2.1 Pemosisian subjek.....	13
2.3 Penelitian Terdahulu	18
BAB III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Sumber dan Objek Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Sumber Data, Data dan Korpus Data.....	27

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Kerangka Analisis.....	29
3.7 Kerangka kerja.....	31
3.8 Uji Keabsahan Data.....	31
IV. PEMBAHASAN.....	32
4.1 Kriminalitas dan seksualitas Buruh Migran Perempuan.....	32
4.1.1 Kriminalitas Buruh Migran Perempuan.....	38
4.1.2 Seksualitas Buruh Migran Perempuan.....	71
4.2 Politik dan Kebijakan Pemerintah terkait Buruh Migran Perempuan.....	105
4.3 Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	148
4.3 Komparasi Media pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com mengenai Konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan.....	193
4.4 Konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan.....	204
4.6 Alasan Media melakukan konstruksi Identitas terhadap Buruh Migran Perempuan 211	
4.7 Arena Perjuangan Buruh Migran Perempuan dalam menegosiasikan posisinya di pemberitaan.....	219
BAB V.PENUTUP.....	222
5.1 Kesimpulan.....	222
5.2 Saran.....	224
DAFTAR PUSTAKA.....	228

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pie Chart Perbandingan Traffic Source Media Pemberitaan..... 26

Gambar.4 1 Ilustrasi Berita Buruh Migran Perempuan Jawa Pos.com 165



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 18

Tabel 3. 1 Model Kerangka Analisis Sara Mills 30

Tabel 4. 1 Daftar Berita Kriminalitas dan Seksualitas Buruh Migran Perempuan 36

Tabel 4. 2 Analisis Wacana Sara Mills Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan.. 43

Tabel 4. 3 Analisis Wacana Sara Mills Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan... 50

Tabel 4. 4 Komparasi Berdasarkan Analisis Sara Mills Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan..... 52

Tabel 4. 5 Komparasi Berdasarkan Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan 55

Tabel 4. 6 Analisis Sara Mills Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan..... 59

Tabel 4. 7 Analisis Wacana Sara Mills Berita Kriminal Buruh Migran Perempuan 65

Tabel 4. 8 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Kriminal Buruh Migran Perempuan..... 68

Tabel 4. 9 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Kriminalitas Buruh Migran Perempuan..... 70

Tabel 4. 10 Analisis Wacana Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan... 76

Tabel 4. 11 Analisis Wacana Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan... 82

Tabel 4. 12 Komparasi Berdasarkan Analisis Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan..... 86

Tabel 4. 13 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan 88

Tabel 4. 14 Analisis Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan..... 92

Tabel 4. 15 Analisis Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan..... 97

Tabel 4. 16 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan..... 99

Tabel 4. 17 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Seksualitas Buruh Migran Perempuan 101

Tabel 4. 18 Daftar berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 107

Tabel 4. 19 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 112

Tabel 4. 20 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 117

Tabel 4. 21 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan 119

Tabel 4. 22 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 121

Tabel 4. 23 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 125

Tabel 4. 24 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 130

Tabel 4. 25 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan 133

Tabel 4. 26 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan..... 135

Tabel 4. 27 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan.....	138
Tabel 4. 28 Analisis Wacana Sara Mills Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan.....	143
Tabel 4. 29 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan.....	146
Tabel 4. 30 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com.....	147
Tabel 4. 31 Daftar Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran	151
Tabel 4. 32 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	156
Tabel 4. 33 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	162
Tabel 4. 34 Penggunaan kosakata dalam berita	165
Tabel 4. 35 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	167
Tabel 4. 36 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	168
Tabel 4. 37 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	172
Tabel 4. 38 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	176
Tabel 4. 39 Komparasi Berdasarkan Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	178
Tabel 4. 40 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	180
Tabel 4. 41 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	183
Tabel 4. 42 Analisis Wacana Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan.....	188
Tabel 4. 43 Penggunaan Kosakata dalam Berita.....	190
Tabel 4. 44 Komparasi Berdasarkan Analisis Media Pemberitaan Sara Mills Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	190
Tabel 4. 45 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com Berita Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan	192
Tabel 4. 46 Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com.....	194

DAFTAR LAMPIRAN

lampiran 1. 1 Ibunda TKW Tuti: Anak Saya yang Diperkosa, Mengapa Malah Dieksekusi Mati? 1

lampiran 1. 2 Aniaya Berat TKW 19 Tahun, Majikan Divonis Ringan Pengadilan Malaysia..... 1

lampiran 1. 3 Jaringan Buruh Minta Pemerintah RI Tak Buru-buru Eksekusi Marry Jane 1

lampiran 1. 4 TKW Asal Madura Gagal Selundupkan 925 Gram Sabu 1

lampiran 1. 5 Mangga Indramayu dan Eksploitasi Tubuh Perempuan 1

lampiran 1. 6 Aksi Dewasa Ngobong Ati, Ternyata Bukan TKW Banyuwangi 1

lampiran 1. 7 Tertangkap Basah Berbuat Mesum, TKW Ini Malah Ajak Polisi "Selfie" ... 1

lampiran 1. 8 Solusi Masalah Seks Buruh Migran..... 1

lampiran 1. 9 Menaker: TKI yang Serbu China, Bukan TKA China yang Serbu Indonesia 1

lampiran 1. 10 Migrant Care: Angin Segar dari UU Perlindungan Migran Mulai Tak Terasa..... 1

lampiran 1. 11 Mahasiswi Yogyakarta Dikira TKI, Ditahan Petugas hingga Terlantar di Kupang..... 1

lampiran 1. 12 TKW Mempawah Meninggal di Malaysia, Pemerintah Tutup Mata Biaya Pemulangan? 1

lampiran 1. 13 Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi Babu karena Kemiskinan. 1

lampiran 1. 14 Politikus PDIP Ini Bela Fahri Hamzah Soal "Babu" 1

lampiran 1. 15 Cerai Susuk, Cara Perceraian TKW Asal Banyuwangi 1

lampiran 1. 16 Pulang Jadi TKW, Jilbab Dilepas, Gayanya Sudah Kalahkan Syahrini 1

lampiran 1. 17 Merasa Penghasilan Lebih Tinggi, Banyak TKW Ponorogo Minta Cerai.. 1

lampiran 1. 18 Anak TKW asal Ponorogo Banyak Menikah di Bawah Umur 1

lampiran 1. 19 91 Orang Pilih Jadi TKW dan Mangkir Ikut UN 1

lampiran 1. 20 Suami Kesepian Ditinggal Istri Jadi TKW, Anak Kandung Digarap 1

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Buruh Migran menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Pernyataan tersebut tidak terlepas dari banyaknya warga negara Indonesia yang memilih bekerja di sektor ini, tercatat sekitar 185,668 Buruh Migran yang dikirimkan untuk bekerja di luar negeri terhitung mulai Januari sampai Agustus 2018. Presentase Buruh Migran di sektor formal sendiri sebesar 48% dan sektor informal sebesar 52%, fakta mengejutkan lainnya adalah mengenai buruh migran Indonesia yang didominasi oleh pekerja perempuan dengan presentase 70% perempuan dan 30% laki-laki.¹ Besaran data yang telah dijelaskan sebelumnya mendorong kajian ini untuk mengulas lebih jauh mengenai Buruh Migran Perempuan (BMP) sebagai subjek penelitian dengan konstruksi identitas sebagai objek kajian untuk melihat bagaimana seorang Buruh Migran Perempuan (BMP) dengan segala kontradiksi yang melingkupinya dibangun dan ditampilkan di media massa.

Tingginya permintaan Buruh Migran Perempuan (BMP) tidak diimbangi dengan perlindungan dan penanganan yang optimal. Sampai saat ini Buruh Migran Perempuan (BMP) masih menjadi kalangan yang rentan terhadap pelanggaran hak, kekerasan, pelecehan seksual, dan banyak kasus kriminalitas lainnya. Era domestifikasi perempuan yang dianggap telah lama berlalu seolah dikemas kembali. Eksistensi 'Buruh Migran Perempuan' menjadi saksi bisu yang menunjukkan lahirnya perbudakan modern yang menempatkan pekerjaan sebagai Buruh Migran Perempuan menjadi alasan untuk melegalkan penindasan dan ketidakadilan.

Permulaan dari rentetan permasalahan yang dihadapi Buruh Migran berkaitan erat dengan keterdesakan ekonomi yang menjadi motivasi dilakukannya migrasi oleh mayoritas Buruh Migran (Winchie and Carment, 1989). Sejalan dengan keterdesakan ekonomi sebagai *migration motivation* imigran bahkan harus bekerja dan memikul peran ganda sehingga berakhir dengan lahirnya perbedaan

gender (gender differences) yang memicu munculnya ketidakadilan gender (Gender Inequalities). Dengan kenyataan yang demikian, maka Buruh Migran Perempuan memiliki risiko yang lebih besar untuk mengalami masalah sosial seperti pelanggaran hak, kekerasan diskriminasi, marginalisasi dan kriminalitas lain akibat profesinya sebagai buruh migran perempuan. Situasi sosial yang dihadapi BMP ini sesuai dengan kutipan berikut:

Perbedaan gender ternyata mengakibatkan lahirnya stereotipe, yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Sifat dan stereotipe yang sebetulnya merupakan konstruksi ataupun rekayasa sosial pada akhirnya terkukuhkan menjadi kodrat kultural, dalam proses yang panjang akhirnya telah mengakibatkan terkondisinya posisi perempuan :marginalisasi, stereotipe, kekerasan dan lain-lain (Mansour, 2012, P.17).

Kutipan tersebut menjadi pembuka bagi penelitian ini untuk menjelaskan konstruksi identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di media pemberitaan yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan bagaimana posisi perempuan ditampilkan dihadapan publik, sehingga apa yang diproyeksikan oleh media pemberitaan juga akan menjadi konstruksi sosial bagi masyarakat dalam melihat dan memperlakukan Buruh Migran Perempuan (BMP) sebagai bentuk dari praktik sosial.

Wacana memiliki hubungan ganda dengan lingkungan sosial dilihat dari bagaimana wacana dominan mengendalikan praktik sosial, politik dan budaya masyarakat. Althusser menyebutnya sebagai interpelasi yakni, melalui mana seseorang akan ditempatkan posisinya dalam masyarakat. Subjek dan pengakuan atas posisi ini akan dihubungkan secara imajiner dengan kondisi dari hubungan kita dengan keseluruhan produksi makna yang ada dalam masyarakat (Eriyanto,2001, P.206). Penelitian ini fokus terhadap wacana dominan terkait Buruh Migran Perempuan seperti kriminalitas dan seksualitas, politik dan kebijakan serta permasalahan keluarga karena dapat merefleksikan identitas BMP dalam jaring pemberitaan. Penelitian ini juga menggunakan kerangka analisis menggunakan subjek subjek-objek, posisi negara, posisi penulis-pembaca, mediasi dan kode budaya untuk melihat bagaimana Buruh Migran Perempuan di posisikan dalam jaring pemberitaan Kompas dan JawaPos mutakhir.

Konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan menjadi bagian dari kontestasi BMP dihadapan publik yang disetting oleh media jaringan. Dengan alasan demikian maka penting untuk melihat pengaruh dan perkembangan pers di Indonesia. Secara historis perkembangan pers di Indonesia ditandai oleh momentum “masa orde baru yang otoriter” dimana media tidak memiliki kebebasan dan ditekan untuk menjadi corong pemerintah dalam mengendalikan masyarakat.

Runtuhnya orde baru atas kepemimpinan Soeharto menjadi titik balik dari sejarah pers, sejarah kelam tersebut seperti ditulis ulang dengan hadirnya reformasi yang menjadi langkah awal dilakukannya pembebasan pers dari cengkaman rezim otoriter. Era reformasi adalah era keterbukaan pers yang bisa dikatakan memiliki jasa yang besar mengingat peranannya dalam mengawal dan meletakkan asas demokratisasi dalam hak bersuara dan berpendapat. Pers mengalami banyak pergeseran secara signifikan pada era Habibie, Gusdur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono demikian pula dengan Joko Widodo yang mana media menjadi lebih berani dalam menyuarakan aspirasi dan kritik untuk memperjuangkan hak-hak untuk menuntut keadilan.

Perkembangan pers pada era pemerintahan sebelumnya secara tidak langsung akan menjadi tolak ukur untuk melihat pergulatan pers dan perubahan situasi sosial di era pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan Arnez Blackburn (dalam Rochimah, 2018:3) yang menegaskan bahwa jatuhnya soeharto menyebabkan perubahan dalam kehidupan politik secara dramatis, termasuk terhadap gerakan perempuan dan isu-isu perempuan. Kondisi sistem politik ini juga mengubah fokus perhatian dimana hubungan antara negara dan perempuan menjadi sangat krusial. Korelasi antara pers, politik dan problematika perempuan yang demikian tidak menutup kemungkinan terjadi pada Buruh Migran Perempuan, sehingga menarik untuk melihat bagaimana media menampilkan BMP.

Dengan mempertimbangkan jejak perkembangan pers beserta permasalahan konstan yang melingkupinya maka penelitian ini berusaha untuk melihat keberadaan Media pemberitaan tidak hanya sebagai saluran saja. Media hari ini menjadi sangat substansif, karena media massa melakukan proses eksternalisasi,

subjektivasi, dan internalisasi dalam mengkonstruksi realitas Buruh Migran Perempuan (BMP) pada masyarakat luas melalui berbagai macam pemberitaan. Apa yang diberitakan oleh media pemberitaan seolah-olah menjadi tolak ukur untuk menilai dan menghakimi banyak hal, termasuk dalam memandang dan memperlakukan Buruh Migran Perempuan (BMP). Dengan pertimbangan tersebut maka sudah jelas jika keberadaan media massa melalui wacana dominannya sangat menentukan keberlanjutan hidup buruh migran ditengah kehidupan bermasyarakat.

Pemberitaan negatif mengenai Buruh Migran Perempuan (BMP) memiliki peranan yang besar dalam mengkonstruksi “kebenaran” pada masyarakat. Hal ini didukung oleh kuasa media dalam mempengaruhi atau bahkan melakukan hegemoni untuk membentuk opini publik, media hanya akan menampilkan apa yang menurut media menguntungkan sesuai dengan kepentingan mereka. Media massa mempunyai potensi yang besar sebagai pemicu munculnya bentuk-bentuk realitas terjadinya ketimpangan hubungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat (Wolf dalam Sunarto, 2009; Setiawan, 2011, P.14). Munculnya permasalahan tersebut akibat pemahaman bahwa sebuah teks berupa berita seringkali disamakan seperti sebuah salinan dari realitas, sehingga diterima mentah-mentah. Disisi lain berita sendiri merupakan konstruksi atas realitas, berita hanyalah bingkai dari realita bukan realita itu sendiri.

Konstruksi media mengenai buruh migran hari ini terkesan bias dan tidak sesuai realitas. Banyak pemberitaan mengenai Buruh Migran Perempuan (BMP) yang disampaikan dengan nada sarkasme dan yang cenderung vulgar, seperti penggunaan bahasa seksisme dalam headline berita yang sarat akan konsepsi negatif. Selain itu banyaknya pemberitaan BMP yang dijatuhi hukuman mati di negara Timur Tengah akibat terlibat kasus kriminal seperti pembunuhan yang dilakukan untuk menghindari pemerkosaan oleh majikan membuat BMP selalu diwartakan sebagai sosok kriminal. Hal tersebut menandakan keadaan buruh migran perempuan dalam media pemberitaan cenderung dikriminalisasikan, pernyataan tersebut merujuk pada banyaknya kasus kriminal BMP yang

melakukan pembelaan diri dengan tujuan untuk menghindari pemerkosaan bukan hanya sekali-duakali disisihkan dari penceritaan.

Penyampaian status BMP sebagai sosok kriminal hanya akan menambah catatan kriminal yang dilakukan oleh BMP. Beberapa kasus tersebut seharusnya sudah merepresentasikan keadaan Buruh Migran Perempuan (BMP) yang seringkali di subordinasikan dalam berbagai pemberitaan, sehingga perlu untuk menelaah lebih jauh tentang bagaimana konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di media dengan lebih adil dan netral.

Kepentingan media massa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengkonstruksi agenda pemberitaan media di masyarakat, sehingga agenda tersebut menjadi konstruksi sosial di masyarakat pada akhirnya. Kekuatan media massa itu sendiri sebagai media penyebaran informasi yang sangat cepat, luas, serentak, *suddenly* dan dapat mengkonstruksi citra yang amat berkesan terhadap objek yang diberitakan di masyarakat (Bungin, 2006:353). Ini berarti bahwa ada kemungkinan besar cara masyarakat memperlakukan Buruh Migran Perempuan (BMP) dengan baik atau buruk tergantung pada konstruksi media massa, karena sudah tertanam *basic knowledge* dalam konstruk berfikir masyarakat mengenai “Buruh Migran Perempuan” yang diadopsi dari media pemberitaan sebelumnya. Kenyataan yang demikian membenarkan bahwa produksi wacana pada media massa menentukan perlakuan sosial seperti apa yang akan Buruh Migran Perempuan (BMP) dapatkan.

Konstruksi media massa selain bisa merusak reputasi Buruh Migran Perempuan juga akan mengakibatkan dampak buruk bagi buruh migran perempuan dalam praktik sosialnya. Buruknya situasi sosial yang dihadapi oleh Buruh Migran Perempuan akibat media massa hari ini dapat dilihat pada kasus Fahri Hamzah yang dijelaskan oleh Eni Lestari selaku Ketua International Migrant Alliance (IMA) dalam media pemberitaan Kompas.com dengan judul *Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi ‘Babu’ karena Kemiskinan*.

Pada kasus Buruh Migran yang melibatkan Fahri Hamzah tersebut menjelaskan bahwa Fahri Hamzah menggambarkan buruh migran perempuan sebagai anak bangsa yang mengemis menjadi babu di negeri orang sementara

pekerja asing merajalela di Indonesia, lebih lanjut Eni juga menegaskan bahwa terdapat media massa online (bukan kompas) yang memuat pernyataan Fahri dengan menyebut 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV. Eni yang dengan keras mengecam tindakan Fahri Hamzah tersebut melalui pernyataan:

“Fahri juga pernah melontarkan pernyataan yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran, dan menjerumuskan masyarakat.” (diakses dari media pemberitaan online kompas.com: Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi ‘Babu’ karena Kemiskinan <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/25/14365481/fahri.harusnya.paham.anak.bangsa.menjadi.babu.karena.kemiskinan>. pada 15 Oktober 2018 pada pukul 23:01)

Jika Fahri memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta dan kemudian banyak diberitakan secara online di media massa maka kenyataan pahit akan dirasakan kembali oleh buruh migran. Pemberitaan yang demikian hanya akan mengkampanyekan kebenaran bahwa Buruh Migran Perempuan adalah “Babu” dan pengidap HIV. Sehingga wacana tentang BMP tidak hanya akan berakhir dengan kasus penyebutan BMP sebagai “babu” lagi tapi merambah pada masalah munculnya prasangka dan rasa takut masyarakat pada BMP yang tidak hanya dianggap sebagai subjek memalukan tapi sebagai virus juga. Media sosial twitter yang digunakan oleh fahri sebagai alat untuk memproklamirkan BMP sebagai babu dan pengidap HIV secara otomatis membuktikan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk wacana mengenai BMP. Media pemberitaan seharusnya memboikot ujaran kebencian yang demikian untuk menciptakan masyarakat yang bernalar kritis.

Dari kutipan tersebut jelas jika pernyataan Fahri Hamzah yang tergolong frontal menyebut Buruh Migran Perempuan sebagai “Babu” secara tidak langsung akan mengkonstruksi BMP sebagai kalangan marginal. Sistem sosial yang berwujud status dan hierarki akan selamanya menjadi dinding tak kasat mata yang akan membatasi mobilitas Buruh Migran Perempuan. Statement fahri dinilai menjerumuskan masyarakat dengan menggiring opini publik untuk mempersulit posisi sosial para Buruh Migran Perempuan.

Sesaat setelah membaca berita tersebut kita akan disuguhkan dengan pertanyaan mengenai seperti apa sosok buruh migran perempuan itu? Maka hal

pertama yang ada dipikiran kita adalah banyaknya pekerja rendahan yang memermalukan negara, imigran yang terlibat kasus human trafficking, pengidap HIV, tersangka pembunuhan majikan yang berujung pada eksekusi mati, keluarga *broken home* karena tingginya angka perceraian dan nikah dini yang terjadi dalam keluarga BMP. Apakah kita sempat terfikir bahwa buruh migran perempuan yang selama ini kita anggap sebagai “babu” adalah pahlawan devisa?. Identitas buruh migran perempuan seakan menjadi aib hanya karena beberapa dari mereka mengalami kemalangan akibat terbelit dalam kasus atau perkara pidana, hanya karena mereka bekerja di sektor domestik mereka dinilai rendah dan memalukan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji isu-isu pemberitaan yang mengkonstruksi identitas Buruh Migran Perempuan (BMP). Penelitian ini dilakukan dengan membandingkan dua media pemberitaan berbeda yakni Kompas.com dan Jawapos.com yang dinilai memiliki validitas yang konkrit jika dilihat dari reputasi keduanya dalam kancah pemberitaan serta tingginya traffic source di kedua media pemberitaan tersebut dengan alasan yang demikian maka jelas jika Kompas.com dan Jawapos.com memiliki standart yang layak dipertimbangkan untuk melihat lebih jauh bagaimana media hari ini mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) melalui berbagai macam pemberitaan.

Alasan yang melandasi perlunya dilakukan kajian ini adalah karena pemberitaan Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam media massa terlanjur masuk kewilayah yang sangat tematik dan mayoritas bersifat negatif dan bias. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis wacana kritis Sara Mills dengan pendekatan feminis yang memfokuskan penelitian pada posisi subjek-objek dan penulis-pembaca dalam teks berita untuk memahami bagaimana posisi BMP di tampilkan di media pemberitaan.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat keberadaan Buruh Migran Perempuan (BMP) masih dianggap bertentangan dengan nilai sosial serta lekat dengan stigma buruk dimata masyarakat. Selanjutnya media pemberitaan menjadi faktor utama yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Buruh Migran Perempuan (BMP), karena media yang memproduksi wacana sebagai praktik

sosial mengakibatkan konsekuensi logis seperti berubahnya situasi sosial masyarakat. Dengan berbagai pertimbangan inilah maka perlu kiranya untuk melakukan kajian lebih jauh mengenai Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam Berita Daring: Analisis CDA di Kompas dan Jawapos.

1.2 Rumusan Penelitian

Dari latarbelakang dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana Komparasi dari dua Media pemberitaan dalam mengkonstruksi Buruh Migran Perempuan?
- 1.1.2 Bagaimana konstruksi identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam media pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com?
- 1.1.3 Mengapa identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dikonstruksi secara demikian oleh media pemberitaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan utama dilakukannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: Untuk Menganalisis dan mengkomparasikan konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam pemberitaan media massa Kompas.com dan Jawapos.com.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan informasi mengenai *Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam Berita Daring: Analisis CDA di Kompas dan Jawapos*. Hal tersebut penting dilakukan mengingat minimnya studi komparasi tentang konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di Media Massa. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi masukan bagi Media Massa untuk lebih bijak dalam mengkonstruksi sosok Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam berbagai macam pemberitaan.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pertimbangan baik untuk pemerintah maupun lembaga yang berkaitan dengan perlindungan buruh migran

dalam mengambil kebijakan terkait dengan Keberlangsungan hidup Buruh Migran dan purna migran Perempuan. Tanpa melupakan manfaat bagi pembaca, penelitian ini diharapkan pula dapat memberi masukan dan menambah pemahaman mengenai bagaimana media mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam bentuk berita.



BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual

2.1.1 Konstruksi Media Massa

Menurut kamus komunikasi definisi konstruksi adalah suatu konsep, yakni abstraksi sebagai generalisasi dari hal-hal yang khusus, yang dapat diamati dan diukur (Effendy,1989, P.264). Lain halnya dengan Makna konstruksi atau biasa disebut sebagai construction meaning yang diartikan sebagai suatu makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan (Sarwiji, 2008). Untuk itu tidak salah jika menyebut media sebagai agen konstruksi, istilah tersebut dinilai cocok untuk di lekatkan melihat kenyataan hari ini media turut andil dalam membentuk realitas di ruang redaksi, media memiliki kewenangan yang penuh untuk melakukan seleksi atas apa yang pantas dan tidak pantas ditampilkan.

Dengan mempertimbangkan berbagai alasan tersebut maka tidak salah jika media merupakan alat konstruksi yang relevan. Tindakan media yang demikian demikian tidak dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas karena pada dasarnya media massa berfungsi bukan hanya sebagai penyalur informasi saja lebih daripada itu media juga memiliki alur dan ideologi tersendiri dalam menjalankan visi dan misi yang diusungnya. Menjadi suatu yang salah jika media melakukan agenda setting untuk menciptakan sensasionalitas yang merugikan pihak lain demi kepentingan sendiri.

Konstruksi media mengenai sosok Buruh Migran Perempuan (BMP) secara tidak langsung akan menanamkan pengetahuan masyarakat atas sosok Buruh Migran Perempuan (BMP), sebagian besar masyarakat akan mengadopsi pengetahuan tersebut lalu mengaplikasikannya dalam tindakan mereka sebagai sebuah kebiasaan (Habite), selanjutnya konstruksi ini akan mengarah pada bagaimana Buruh Migran Perempuan (BMP) di posisikan dan diperlakukan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dalam pandangan konstruksionis, berita tidak hanya sekedar informasi sebagaimana dipahami oleh kalangan positivis lebih daripada itu berita itu ibarat sebuah drama.

Berita tidak menggambarkan realitas melainkan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa seperti pernyataan berikut:

“News is not about information but drama. Its does not describe the world but potreys an arena of dramatic forces and action; it exist solely in historical time; and invites our partcipation on the basic of our assumption often vicarously, social rules within it. (Carrey dalam Eriyanto, 2001, P.21)

Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas, hal ini disebabkan oleh ragamnya pengalaman, preferensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu pada saat menafsirkan realitas dengan konstruksinya masing-masing. Tetapi perlu dipahami bahwa konstruksi sosial itu bukan hanya plural tetapi juga dinamis semua orang bisa melakukan klaim atas kebenaran yang mereka yakini sama halnya dengan media massa, tapi yang perlu kita ketahui bersama disini adalah kenyataan bahwa kebenaran itu tidak tunggal, bisa dikatakan jika pada dasarnya semua orang mempunyai kebenaran masing-masing berdasarkan versi mereka sendiri, tapi konstruksi juga memerlukan legitimasi dan sumber kebenaran yang kuat untuk menguatkan keyakinan yang kita percayai bahwa apa yang kita yakini adalah benar adanya dan punya dasar yang kuat.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya sudah jelas jika dalam pandangan konstruksionis media dilihat bukan sekedar saluran yang bebas, ia juga subjek yang mengkonstruksi realitas lengkap dengan pandangan bias dan keberpihakkannya. (Tonny Bannet dalam Eriyanto, 2002, P.26) Untuk itu jelas kiranya jika konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa selalu mengalami kontradiksi mengingat BMP masih menjadi kalangan rentan dan transdental dalam berbagai pemberitaan, dengan melakukan studi komparasi akan memberikan kemudahan untuk mengetahui bagaimana cara media menampilkan sosok buruh migran, bagaimana dia dikonstruksikan, bagaimana keberpihakan media dan perbandingan dua media yakni kompas.com dan jawapos.com

dengan keunikan masing-masing dalam mengemas dan menawarkannya ke ruang publik.

2.1.2 Identitas

Erikson (dalam Hasanah, 2003:21) menjelaskan mengenai pengertian identitas yang diartikan sebagai kondisi psikologis secara keseluruhan yang membuat individu dapat menerima dan mengidentifikasi dirinya sendiri, memiliki orientasi, dan tujuan untuk mendapatkan arah dalam menjalani hidup serta mempertimbangkan hal-hal tertentu. Erikson juga menegaskan bahwa identitas diri juga berarti pengukuhan terhadap konsep diri yang bermakna, baik berupa pengalaman, realitas yang terjadi, aktivitas yang sedang dilakukan ataupun akan dilakukan yang cukup untuk membentuk satu kesatuan mengenai “gambar diri” yang utuh, berkesinambungan dan unik.

Sejalan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika, Identitas merupakan suatu bentuk dari gambaran diri seseorang. Dikatakan demikian karena identitas merupakan alat deskripsi yang berfungsi untuk menggambarkan diri sendiri. Hal yang sama berlaku pula untuk Buruh Migran Perempuan, mereka memiliki Identitas untuk menggambarkan diri mereka sendiri yang mewakili, status, orientasi, nilai yang diyakini.

Identitas tidak hanya dimaknai sebagai sebuah formalitas untuk memenuhi persyaratan administratif, seperti halnya nama, jenis pekerjaan ataupun agama yang dianut dalam sebuah kartu tanda penduduk. Lebih daripada itu, identitas diartikan sebagai sebuah citra yang melekat dalam diri seseorang.

2.1.3 Buruh Migran Perempuan (BMP)

Pekerja migran atau Buruh Migran didefinisikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organisation /ILO) sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain, dengan sebuah gambaran bahwa orang tersebut akan dipekerjakan oleh

seseorang yang bukan dirinya sendiri, termasuk siapapun yang biasanya diakui sebagai seorang migran, untuk bekerja.ⁱⁱ

Penyebutan Tenaga Kerja Wanita sendiri sudah jarang digunakan karena Tenaga Kerja Wanita sendiri memiliki konteks yang lebih umum serta batas penggunaan TKW seringkali menimbulkan kerancuan dalam memahami, apakah dia pekerja migran atau hanya pekerja lokal. Lain halnya dengan Buruh Migran Perempuan (BMP) yang jelas menyebutkan kata “Migran” sehingga jelas bahwa dia adalah seorang perempuan orang yang melakukan migrasi untuk bekerja, meskipun terkadang penggunaan terminologi “buruh” dalam Buruh Migran Perempuan sendiri masih dikonotasikan dengan citra pekerja kasar dan distereotipkan karena status sosialnya dianggap rendah.

2.2 Kerangka Teori

Teori yang digunakan untuk membantu memudahkan dalam menganalisis penelitian ini adalah teori pemosisian subjek dan posisi penulis dan Khalayak dengan perspektif feminis Sara Mills. Teori tersebut menjelaskan bagaimana teks bias dalam menampilkan wanita dengan mempertimbangkan posisi subjek-objek tanpa lupa mendeskripsikan posisi penulis dan khalayak. Di kesimpulan kita akan mengetahui Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa melalui pemosisian subjek-objek dan posisi penulis-pembaca tersebut.

2.2.1 Pemosisian subjek

Pemosisian subjek (posisi subjek-objek), menempatkan representasi sebagai bagian terpenting. Bagaimana satu pihak, kelompok, orang, gagasan, dan peristiwa ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana berita yang mempengaruhi pemaknaan ketika diterima oleh khalayak. Penekanannya adalah bagaimana posisi dari aktor sosial, posisi gagasan, atau peristiwa ditempatkan dalam teks.

Pemosisian subjek Sara Mills memusatkan perhatian pada bagaimana posisi aktor ditampilkan dalam teks, posisi-posisi ini dalam arti siapa yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objek penceritaan,

hasilnya akan menentukan bagaimana struktur teks dan bagaimana makna diperlakukan dalam teks secara keseluruhan. Posisi-posisi tersebut pada akhirnya menentukan bentuk teks yang hadir ditengah khalayak. Penting untuk diketahui bahwa posisi dalam teks selalu menimbulkan efek kuasa :

“Wacana tertentu menghasilkan kebenaran dan pengetahuan tertentu yang menimbulkan efek kuasa. kebenaran disini tidak dipahami oleh Foucault sebagai sesuatu yang datang dari langit, bukan juga sebuah konsep abstrak. Akan tetapi, ia diproduksi, setiap kekuasaan menghasilkan dan memproduksi kebenaran sendiri melalui khalayak yang digiring untuk mengikuti kebenaran yang telah ditetapkan tersebut”(Mills, 2007, P.18)

Wacana Feminis hari ini tidak lagi membahas bagaimana perempuan menjadi korban dominasi laki-laki yang didasarkan atas budaya patriarkal. Wacana feminis mutakhir menghadirkan bagaimana wanita ditampilkan bukan menampilkan dirinya sendiri, serta emansipasi perempuan yang dilakukan terhadap sistem sosial, ekonomi, kekuatan politik dan budaya yang bekerja melawan mereka. Tetapi realitanya perlawanan mereka sering dihilangkan dan tidak diceritakan karena dianggap sebagai keganjilan dan kemustahilan, hal ini sejalan dengan gagasan Sara Mills yang mengungkapkan bahwa posisi rendah, baik dalam strata sosial maupun ekonomi tidak selalu menandakan mereka tidak memiliki kekuasaan. Senyatanya perlawanan yang dilakukan oleh perempuan diyakini Mills sebagai perwujudan dari kekuasaan perempuan yang dikatakan lemah secara sosial dan ekonomi.

“Mereka yang berada dalam posisi ekonomi lemah, juga berhasil menegosiasikan dirinya untuk mendapat posisi yang cukup kuat dalam hierarki” (Mills, 1997, terjemahan Zaman, 2007:53).

Dengan pernyataan tersebut jelas jika kekuasaan tidak melulu soal dominasi dan represi tapi dibentuk dengan relasi melalui interaksi, sehingga posisi pembentukan subjek bukan hanya berakhir dengan fatwa bahwa mereka adalah korban tapi seberapa besar perlawanan yang mereka lakukan dan tindakan yang mereka usahakan untuk menempatkan posisi mereka

dalam penceritaan yang kemudian hal tersebut dapat membantu mereka dalam menentukan bagaimana mereka akan dinarasikan kemudian.

Stagnasi dari posisi perempuan selama ini disinyalir berasal dari anggapan bahwa perempuan merupakan subjek yang lemah dan salah. Wacana yang demikian tumbuh subur dan berkembang tanpa kita sadari berasal dari bacaan ataupun tontonan audio visual seperti lagu, novel, media pemberitaan dll. Inilah yang kemudian menciptakan diskursus atas subjektivitas perempuan yang lemah dan marginal, karena ketidakbepihakkan penulis dan alur cerita yang memudahkan pengaruh serta peran mereka.

Situasi diatas dianggap Mills sebagai benturan wacana antara subjektivitas dan ketidakberdayaan (*subjection*). Saat perempuan melakukan tindakan ataupun upaya untuk menegaskan subjektivitasnya, maka akan dipertanyakan kebenarannya karena yang ada dalam wacana perempuan selama ini merupakan simbol dari ketidakberdayaan jika perempuan memiliki kekuatannya sendiri maka hal tersebut bertentangan dengan wacana perempuan yang diyakini selama ini. (Mills, 1997, terjemahan Zaman, 2007:137)

2.2.1.1 Posisi Negara

Didalam pemosisian subjek-objek terdapat posisi negara yang disebut oleh althusser sebagai interpelasi. Gagasan althusser banyak mengilhami analisis teks terutama dalam menentukan bagaimana subjek atau objek mengidentifikasi dirinya dalam teks, melalui mana pula pembaca diposisikan dalam teks. Hal tersebut sejalan dengan Interpelasi yang merupakan melalui mana seseorang akan ditempatkan posisinya dalam masyarakat. Individu ditempatkan sebagai subjek, kita disadarkan mengenai posisi kita dalam masyarakat, yang mana kita menjadi subjek dalam dua dunia: kita adalah subjek sebagai individu dan kita adalah subjek dari kekuasaan.

Dalam proses ini seseorang akan menerima dan mengakui posisinya bukan hanya sebagai individu, tetapi juga dalam hubungan dengan relasi dan kekuasaan, untuk itu hal ini sama saja dengan melihat

bagaimana negara hadir dan ditampilkan dalam teks sehingga subjek akan menyadari posisinya. (Eriyanto:2001,206)

Dengan demikian maka pemosisian subjek (posisi subjek-objek) merupakan langkah yang menentukan dalam penelitian ini. Langkah tersebut berfungsi untuk melihat bagaimana pembaca diposisikan dalam teks .

2.2.2 Posisi Penulis dan Khalayak

Menurut Mills posisi pembaca atau khalayak keberadaannya dinilai penting dan harus diperhitungkan. Pembaca bukan hanya berperan sebagai penerima teks yang pasif, tetapi lebih dari pada itu pembaca juga melakukan transaksi sebagaimana terlibat dalam teks (Aliah, 2014, P.121). Sekalipun penulis memiliki kontribusi yang besar dalam mengkonstruksi pengetahuan tetapi pembaca memiliki kuasa untuk menentukan keputusan akhir melalui penolakan atau penerimaan sebagai bentuk dari reaksi sosial. Inilah proses transaksi antara penulis dan pembaca yang berusaha di gambarkan. Berdasarkan pemaparan diatas maka jelas jika Mills berusaha menampilkan bagaimana posisi perempuan yang dalam penelitian ini adalah Buruh Migran Perempuan ditampilkan dan dikonstruksikan.

Mengetahui posisi penulis (media massa) dan juga posisi pembaca atau khalayak dalam teks pemberitaan menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan. Pendapat diatas sesuai dengan perhatian Sara Mills yang menitik beratkan fokus perhatiannya terhadap strategi wacana untuk melihat bagaimana pembaca ditampilkan dalam teks. Strategi tersebut berkaitan dengan pertanyaan bagaimanakah pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dalam pencitraan (Badara, 2014, P.50). Hal ini menjelaskan bahwa posisi pembaca sangatlah penting dan harus dipertimbangkan dalam suatu teks, karena teks merupakan suatu negosiasi antara penulis dan pembaca. Cara penceritaan dan posisi-posisi yang ditampilkan membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain menjadi *illegitimate*. (Sara Mills dalam Eriyanto, 2001, P.200).

2.2.2.1 Mediasi

Mediasi secara tidak langsung dapat dipahami sebagai salah satu unsur terpenting dalam pemosisian khalayak atau pembaca. Suatu teks umumnya membawa tingkatan wacana, dimana posisi kebenaran ditempatkan secara hierarkis sehingga pembaca dapat mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya sendiri kedalam karakter yang tersaji dalam teks.

Secara tidak langsung mediasi dapat diartikan sebagai suatu strategi pemberitaan dalam teks yang menekankan unsur haru atau semacamnya dengan cara penceritaan yang mensugestikan pada pembaca untuk menematkan dirinya dalam penderitaan tokoh baik subjek ataupun objek berita. Sugesti bisa dituliskan atau dinarasikan oleh penulis secara langsung maupun tersirat atau bisa berasal dari bagaimana subjek atau objek menggambarkan atau menceritakan penderitaannya dalam teks. (Eriyanto:2001,208)

2.2.2.2 Kode Budaya

Kode Budaya sebagai nilai budaya merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Roland Barthes, ini mengacu pada kode atau nilai budaya yang dipakai oleh pembaca ketika menafsirkan suatu teks. Barthes seperti dikutip Mills menunjukkan bahwa kode budaya dapat ditemukan isalnya dengan pernyataan: “seperti yang kita ketahui bersama”, atau “kenyataannya” dan lainnya. Kalimat yang demikian mensugestikan sejumlah informasi yang dipercaya atau diakui secara bersama, dianggap sebagai kebenaran bersama.

Kode Budaya juga bisa berupa klaim atas kebenaran melalui kalimat seperti: “seharusnya” atau “sejajarnya”, hal tersebut didasarkan atas kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat sebagai nilai mayoritas. Untuk itu kode budaya merupakan salah satu unsur yang penting dalam Pemosisian khalayak atau pembaca, karena dapat membantu pembaca untuk menempatkan dirinya terutama dengan orientasi nilai yang disetujui dan dianggap benar oleh pembaca. (Eriyanto:2001,208)

Penelitian dengan metode yang demikian diharapkan mampu memproyeksikan bagaimana pemberitaan hari ini menampilkan dan membangun identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa. Sehingga tidak ada lagi statement dan argumen yang menyudutkan posisi Buruh Migran Perempuan, atau bahkan ujaran kebencian dan rasisme yang berusaha melekatkan image “babu”, “kriminal” dan lain sejenisnya terhadap BMP. Penelitian ini berusaha memberikan ruang kepada BMP untuk dihargai dan dilihat sebagai pekerja. Dengan demikian maka penelitian ini sejalan dengan tujuan Sara Mills yang berusaha untuk menganalisis Ketidakadilan dalam penggambaran yang buruk mengenai wanita sehingga kasus-kasus penindasan dan kekerasan pada perempuan bisa diminimalkan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi dari penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui letak perbedaan dan kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Sasaran Telaah	Penelitian yang ditelaah		
	Penelitian 1	Penelitian 2	Penelitian 3
Judul Penelitian	Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka Oleh : Yuliyanto Budi Setiawan	Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Merdeka.com dan Kompas.com) Oleh Fauziah dan Armis	Analisis Wacana Pemberitaan Kekerasan Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Harian Umum Republika (Edisi 22 November-25 November 2010)

		Tamampil	
Pertanyaan Penelitian	Bagaimana pemberitaan kekerasan berbasis gender di surat kabar harian suara merdeka ?	Bagaimana Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta?	1. Bagaimana konstruksi wacana yang terdapat dalam berita kekerasan TKW Indonesiapada Harian Umum Republika? 2. Bagaimana Berita Penyajian Kekerasan TKW Indonesia pada Harian Umum Republika ditinjau dari Kognisi Sosial? 3. Bagaimana konteks sosial TKW Indonesia pada Harian Umum Republika?
Temuan	Temuan dalam penelitian ini adalah bahwa Secara tekstual, teks-teks berita tentang kasus kekerasan terhadap wanita di media harian suara merdeka menunjukkan bias gender. Harian Suara Merdeka juga tidak fair, di satu sisi pemberitaan tentang korban kekerasan diblow up dan direvictimisasi, sementara adanya	Pada surat kabar harian suara merdeka dan Kompas keduanya cenderung menampilkan Perempuan yang berada pada posisi objek sedangkan laki-laki berada pada posisi subjek sehingga penceritaan dalam berita di narasikan sesuai sudut pandang laki-laki, sehingga kekerasan yang menjadi bahasan	Pemberitaan mengenai kekerasan terhadap TKW Indonesia secara konteks dan kognisi sosial mendapatkan perhatian khusus bagi Harian Umum Republika, mereka mengancam tindakan yang tidak manusiawi tersebut karena bersebrangan dengan motto Harian Umum Republika "Rahmatan lil

	<p>fakta pelaku kekerasan yang berasal dari tokoh agama, terkesan ditutupi dan tidak diangkat oleh jajaran redaksi media. Secara konteks sociocultural, teks yang merendahkan atau memarginalkan posisi wanita ini merepresentasikan ideologi patriarkal yang ada dalam masyarakat.</p>	<p>dalam topik ini kurang melihat perempuan sebagai korban.inilah ketimpangan sosial yang terjadi di penelitian tersebut.</p>	<p>alaman”. Pemberitaannya juga dinilai agamis dan realistis mengingat misi dan nilai yang diemban Harian Umum Republika islami sekali.</p>
Metode penelitian	<p>Deskriptif kualitatif dengan perspektif kritis.</p>	<p>Pendekatan kualitatif dengan melakukan analisis isi kualitatif terlebih dahulu terhadap pemberitaan di Merdeka dan Kompas online, kemudian baru dilakukan analisis wacana kritis untuk mengetahui perspektif pembaca dan penulis yang ditampilkan dalam teks pemberitaan tersebut.</p>	<p>Analisis Wacana Teun A Van Dijk.</p>
Teori yang dipakai	<p>Critical Discourse Analysis Norman Fairclough</p>	<p>Analisis Wacana Sara Mills</p>	<p>Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger dan Luckman</p>

<p>Persamaan penelitian</p>	<p>Persamaan yang ditemukan dalam penelitian pertama ini adalah sama-sama berusaha untuk mengkaji secara kritis bagaimana media pemberitaan dalam menampilkan seorang perempuan di mata publik, sama-sama melihat bagaimana media membawa kepentingan tersendiri dan cenderung menempatkan diri sebagai kalangan oportunistis, dalam kata lain media dalam penelitian pertama hanya berorientasi pada keuntungan secara material, dalam artian dia tidak netral dan akan menempatkan keberpihakkannya pada pihak yang memiliki kekuasaan seperti elit politik atau tokoh agama.</p>	<p>Persamaan penelitian nya terletak pada penggunaan teori Sara Mills sehingga terdapat kesamaan dalam fokus penelitian, yang berusaha melihat posisi perempuan sebagai aktor dalam pemberitaan, namun seringkali ditempatkan bukan sebagai subjek namun objek penceritaan dengan sudut pandang laki-laki sehingga perempuan yang sebenarnya adalah korban menjadi terdistorsi.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang Tenaga Kerja Wanita, dan menitik beratkan fokus perhatiannya pada seputar permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga Kerja wanita, serta melakukan analisis wacana di media pemberitaan terkait TKW Indonesia..</p>
<p>Perbedaan penelitian</p>	<p>Penelitian pertama hanya terfokus pada kekerasan dan gender, sedangkan penelitian ini mengambil sub</p>	<p>Penelitian kedua bersifat Regional yakni hanya mengkaji pemberitaan di wilayah Jakarta saja, Meskipun</p>	<p>Penelitian ketiga Hanya terfokus pada satu pemberitaan di satu media tidak ada komparasi dari dua media</p>

	<p>fokus dengan menganalisis tema berita terkait sustainability, kekerasan, marginalisasi dan lain-lain. Selanjutnya penelitian pertama Subjek pemberitaan hanya terfokus pada perempuan secara umum, sedangkan penelitian ini menjadikan Buruh Migran Perempuan (BMP) sebagai subjek penelitian yang lekat dengan stereotip buruk bahkan dianggap sebagai kalangan problematik. Metode penelitian yang digunakan juga berbeda, penelitian ini menggunakan analisis Sara Mills sedangkan penelitian pertama tersebut menggunakan Fairclough.</p>	<p>sama-sama menggunakan analisis wacana Sara Mills yang mengkaji perempuan namun penelitian kedua hanya terfokus pada lingkup kekerasan rumah tangga, sedangkan penelitian ini lebih kompleks yakni membahas konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP). Sama-sama melakukan studi komparasi tetapi media yang di analisis berbeda. Jika penelitian kedua menggunakan Kompas dan Suara Merdeka penelitian ini menggunakan Kompas.com dan Jawapos.com.</p>	<p>berbeda, dan lebih prefer terhadap pembahasan mengenai kasus kekerasan pada TKW Indonesia saja. Lain halnya dengan penelitian ini yang ingin mengulas lebih jauh bagaimana media mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP), bagaimana 2 media yang berbeda dalam menampilkan sosok Buruh Migran Perempuan (BMP) dengan idealisme yang berbeda pula.</p>
--	--	---	--

Kelebihan penelitian Konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di Media Massa: Studi Komparasi Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com adalah media yang digunakan yakni Kompas.com dan Jawapos.com jarang dikomparasikan untuk melihat bagaimana sosok Buruh Migran Perempuan (BMP)

di konstruksi, karena selama ini mayoritas penelitian lebih memprioritaskan Surat Kabar Harian Suara Merdeka ataupun Republika.

Tidak mengherankan memang, mengingat surat harian merdeka yang mengusung nilai-nilai nasionalis atau sekuler yang seharusnya menempatkan perempuan setara justru cenderung memarginalkan aktor perempuan. Lain halnya dengan republika yang lebih santun dan apa adanya pada saat menampilkan sosok perempuan mengingat surat kabar republika mengusung nilai agama, lebih lanjut Kompas sendiri dinilai lebih netral dalam menampilkan perempuan dalam setiap pemberitaannya mengingat nilai-nilai humanis yang diangkat serta kalangan akademisi yang menjadi sasaran pembacanya (Badara, 2014).

Alasan utama yang melatarbelakangi digunakannya Kompas.com dan Jawapos.com sebagai sumber penelitian tidak terlepas dari reputasi dan dedikasi keduanya. Kompas.com dengan ciri khas dan gaya pemberitaannya yang santun, template berita yang sederhana dalam kata lain tidak berlebihan, gaya jurnalisme cenderung formal dan konsisten. dan Jawapos.com dengan ciri khas dan gaya pemberitaannya *to the point*, penggunaan bahasa yang blak-blakan cenderung kasar, dibuktikan dengan kebiasaan menggunakan diksi yang profokatif pada headline berita.

Penelitian ini juga tidak hanya berhenti untuk membahas bagaimana representasi perempuan, tapi sudah sampai pada tahap konstruksi dimana praktisi media sendiri turut andil dalam mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam mempengaruhi citra Buruh Migran Perempuan (BMP) di mata publik. Selain itu isu-isu terkait permasalahan Buruh Migran terutama perempuan belum ditangani dengan maksimal dan sering dikesampingkan. Berdasarkan alasan tersebut maka kesadaran media maupun masyarakat dalam memandang keberadaan buruh migran merupakan hal yang penting, karena dampak yang diterima Buruh Migran Perempuan (BMP) akibat konstruksi media pemberitaan hari ini menentukan keberlangsungan hidup (*sustainability*) Buruh Migran Perempuan.

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk menjawab masalah dan mencapai tujuan penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan, maka metode yang digunakan disesuaikan dengan kerangka teoritik yang dipakai dalam penelitian ini yakni analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analyze*) dengan perspektif feminis pada level text dengan analisis wacana, dilanjutkan sociocultural practice dengan melakukan studi pustaka dan penelusuran terkait problematika Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa. Analisis wacana sendiri termasuk dalam kategori paradigma kritis, sehubungan dengan hal tersebut maka penelitian ini melakukan analisis wacana kritis yang menitik tekankan fokus perhatiannya pada bagaimana identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dikonstruksi melalui pemosisian aktor dalam teks milik Sara Mills.

Posisi tersebut dilihat sebagai pembentukan posisi subjek seseorang, yang mana satu pihak memiliki posisi sebagai penafsir, sementara pihak lain menjadi objek yang ditafsirkan secara umum. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pertama, bagaimana aktor sosial dalam berita tersebut diposisikan dalam pemberitaan. Kedua, bagaimana pembaca diposisikan dalam teks, teks berita disini dimaknai sebagai hasil dari negosiasi antara penulis dan pembaca. Posisi pembaca juga bermakna khalayak macam apa yang diimajinasikan oleh penulis untuk ditulis. Posisi pemberitaan pada dasarnya tidak hanya berkutat pada teknis jurnalistik tetapi juga politik pemberitaan, hal tersebut mengakibatkan kelompok mana yang diposisikan sebagai pencerita secara tidak langsung akan memonopoli jalannya penceritaan dalam berita sehingga terdapat kepentingan pencerita entah itu bias ataupun prasangka dalam berita tidak dapat dipisahkan (Eriyanto, 2001, P.211).

Setiap aktor memiliki kesempatan yang sama dalam menggambarkan dirinya tindakannya, dalam memandang atau menilai dunia tetapi dengan beberapa sebab mereka tidak bisa menjadi subjek dan berakhir menjadi objek yang diceritakan oleh aktor lain mereka dihadirkan dan direpresentasikan tetapi

hanya sebagai objek. pada akhirnya pemosisian semacam itu akan menentukan bentuk teks yang hadir di khalayak masyarakat secara umum dan menggiring opini publik untuk sejalan dengan jalan cerita dalam berita yang telah dikonstruksikan sebelumnya, karena wacana dominan memegang kendali penuh atas kesadaran masyarakat secara universal.

Mills dan Mullany (2011:01) menegaskan bahwa Kenyataan yang demikian mengingatkan kita tentang fakta bahwa bahasa adalah “arena perjuangan” itu sendiri. Dia seperti menyediakan berbagai pilihan dan memperlihatkan pertarungan ideologi yang dibawanya. Untuk itu tidak salah jika mengatakan teks dalam media pemberitaan bersifat transaksional, dibuktikan dengan negosiasi dalam teks yang ditawarkan dalam bentuk menerima atau menolak argumentasi yang disampaikan.

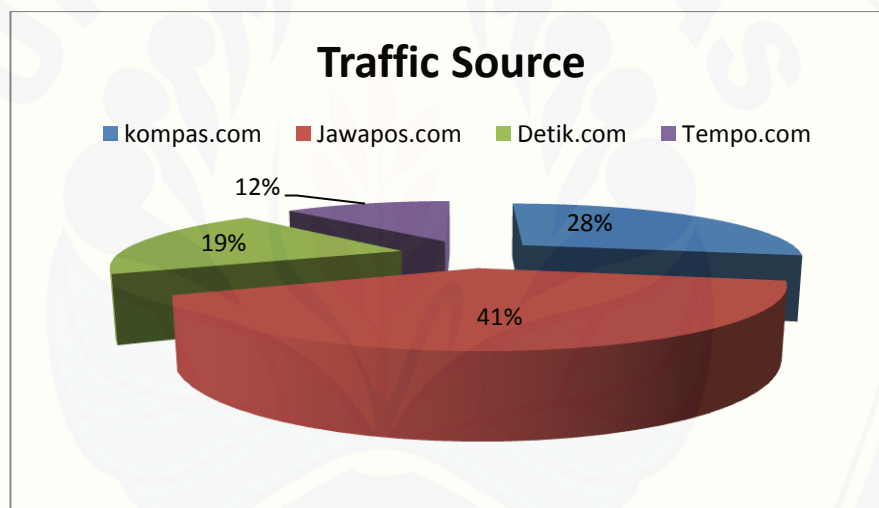
Analisis Sara Mills sendiri dipakai untuk menganalisis wacana pemberitaan suatu teks berita tentang bagaimana wanita ditampilkan dalam teks berita. Penelitian yang dilakukan dengan melakukan studi komparasi pada dua media massa yakni kompas.com dan jawapos.com mengenai Buruh Migran Perempuan (BMP) yang bertujuan untuk mengetahui posisi subjek objek tanpa mengabaikan posisi penulis dengan pembaca dalam penceritaan berita sehingga jelas bagaimana konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam pemberitaan dua media massa yang berbeda.

3.2 Sumber dan Objek Penelitian

Sumber penelitian ini ialah teks-teks berita yang terdapat pada media massa, yang merupakan ruang interaksi secara tidak langsung antara media massa dan khalayak dalam memahami berbagai fenomena konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam pemberitaan media massa, lebih lanjut sumber penelitian ini adalah wacana berita yang berisi tentang Buruh Migran Perempuan (BMP) yang seringkali di tampilkan secara bias dalam berbagai macam pemberitaan, tanpa memperhitungkan konsekuensi logis yang dialami Buruh Migran Perempuan (BMP).

Selain itu media massa *kompas.com* dan *jawapos.com* menjadi faktor penting yang menentukan penelitian ini mengingat keduanya dinilai dapat merepresentasikan nilai-nilai yang diemban media pemberitaan di Indonesia. Media massa Kompas mengemban nilai-nilai *humanisme*, dan Jawapos cenderung melakukan *dehumanisasi*. Sekalipun media Jawapos.com mengklaim bahwa pihaknya mengemban nilai-nilai informatif yang menjunjung tinggi pluralitas tetapi unsur diskriminasi terhadap BMP terlihat jelas dalam pemberitannya. Alasan digunakannya Kompas.com dan Jawapos.com dikarenakan *Traffic Source* yang tinggi dan stabil. Berikut diagram perbandingan Traffic Source keduanya:

Gambar 3. 1 Pie Chart Perbandingan Traffic Source Media Pemberitaan



Diolah dari : Similarweb.com pada 08/07/2019 pukul 01.30WIB.

Diagram tersebut menggambarkan Traffic Source di empat media pemberitaan. Jawapos.com mendominasi Traffic Source dengan presentase 41% posisi kedua diduduki oleh Kompas.com dengan perolehan 28%, Detik.com 19% dan Traffic Source terendah ditempati Tempo.com dengan peresentase 12%. Jawapos.com dan Kompas.com mampu untuk *sustain* dalam dunia jurnalisme di Indonesia serta memiliki sejarah panjang yang membuat keduanya lebih terpercaya, aktual, *up to date* dan memiliki relevansi yang mumpuni untuk melihat bagaimana sosok Buruh Migran Perempuan ditampilkan dan dikonstruksikan. Pemilihan media pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com

menjadi pertimbangan dengan berbagai alasan, salah satunya adalah sesuai dengan apa yang dinyatakan Van Zoest (dalam badara,2013:63), yang menjelaskan bahwa teks tidak pernah lepas dari ideologi dan memiliki kemampuan untuk memanipulasi pembaca ke arah suatu misi tertentu.

Mengingat penelitian ini menggunakan studi komparasi untuk membandingkan dua media pemberitaan yakni Kompas.com dan Jawapos.com dalam mengkonstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) di berbagai pemberitaan, maka terpilihnya kedua media tersebut dirasa sesuai mengingat keduanya memiliki gaya penulisan yang berbeda dalam berbagai sudut pandang, visi dan misi, reputasi serta profesionalitas keduanya dalam dunia jurnalisme mendapatkan pengakuan dan kepercayaan publik. Bahkan keduanya sering di sejajarkan dan diperbandingkan sebagai rival satu sama lain oleh masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Dari sekian banyak persoalan yang berkaitan dengan pemberitaan Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam media massa, seringkali konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) tidak memberikan kesempatan bagi Buruh Migran Perempuan untuk menampilkan dirinya sendiri. Untuk itu penelitian ini berusaha mengemukakan dengan jelas problematika mengenai bagaimana konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa berdasarkan studi komparasi media pemberitaan kompas.com dan jawapos.com.

3.4 Sumber Data, Data dan Korpus Data

Sumber Utama dalam penelitian ini diperoleh dari media pemberitaan kompas.com dan jawapos.com. Dari semua pemberitaan yang ada kemudian di klasifikasikan berdasarkan tema besar yang dianggap sesuai dan sudah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai data utama yang berkaitan dengan konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP), seperti Kriminalisasi dan seksualitas, Politik dan kebijakan serta permasalahan keluarga Buruh Migran Perempuan lima tahun terakhir dengan rentan waktu 2015-2019.

Dipilihnya pemberitaan lima tahun terakhir dikarenakan rentan waktu tersebut selaras dengan perkembangan isu mengenai pemberitaan Buruh Migran Perempuan dan dapat menggambarkan BMP dengan jelas. Selain itu, dalam kurun

waktu lima tahun terakhir terdapat momentum yang menandai sepaik terjang Buruh Migran Perempuan seperti pelaksanaan kebijakan moratorium, UU Perlindungan Migran, sehingga diambilnya waktu lima tahun terakhir menjadi pertimbangan tersendiri yang diputuskan didasarkan atas pertimbangan sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini berusaha mengkomparasikan dua media pemberitaan yakni kompas.com dan jawapos.com untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa. Dipilihnya tema besar seperti Kriminalisasi dan Seksualitas Buruh Migran Perempuan (BMP) didasarkan atas pernyataan:

“perempuan yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual tidak memperoleh kesempatan untuk mengungkapkan secara gamblang apa yang sebenarnya mereka alami. Umumnya surat kabar bahkan memberitakan kejadian yang menimpa mereka sebagai “hiburan”, pembaca” (Abrar,1998, P.164).

Hiburan yang dimaksudkan dalam kutipan tersebut secara tidak langsung membenarkan bahwa media tidak selalu netral, media juga membawa kepentingan lain bersamanya. Wacana mengenai isu-isu perempuan bahkan bisa menjadi komoditas yang memberikan penghidupan bagi media. Analisis wacana bukan hanya menyajikan prasangka tetapi lebih kepada crosscheck untuk melihat realita yang terjadi bukan hasil akhir berupa fakta yang telah dikemas sebelumnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan dan perekaman data penelitian untuk mengetahui konstruksi Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam media massa dengan melakukan studi komparasi di media pemberitaan kompas.com dan jawapos.com dilakukan dengan menempuh beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pencarian sumber data tertulis terkait pemberitaan Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa kompas.com dan jawapos.com dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni pada 2015-2019 pada era pemerintahan Joko Widodo. Penentuan tersebut dilatarbelakangi oleh perbedaan atas permasalahan dan kebijakan yang diambil Joko Widodo

dengan pemerintahan sebelumnya, seperti Moratorium BMP, UU Perlindungan Migran, BUMDES BMP, dan tentunya problematika lain Terkait kebijakan dan permasalahan yang berkaitan dengan Buruh Migran Perempuan.

2. Menentukan secara purposif berita yang akan dianalisis dimana suatu berita mewakili tema pemberitaan seperti kriminalitas dan seksualitas ataupun problematika lain yang merepresentasikan Identitas Buruh Migran Perempuan (BMP) di masing-masing media pemberitaan.
3. Penelitian ini menetapkan jenis berita sebagai ‘umum’. jika berita dipublish dalam portal resmi maka secara otomatis akan menjadi bagian dari wacana. Jika berita tersebut di terbitkan di portal resmi dari media pemberitaan Kompas.com atau Jawapos.com maka dapat diperlakukan untuk dianalisis. Memang terdapat perbedaan antara berita dan opini tetapi kembali lagi pada aturan yang telah ditentukan dalam penelitian ini yang tidak menyoroti dan tidak mengkategorisasikan berita berdasarkan opini atau bukan. Selain itu, Penelitian ini berusaha menetapkan aturan tersebut Tanpa berusaha mengurangi substansi ataupun fungsi dari jenis berita termasuk dalam kategori opini atau bukan.

3.6 Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas analisis posisi penentuan subjek-objek dan penulis-pembaca dalam pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com. Kerangka analisis ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat posisi Buruh Migran Perempuan di media media pemberitaan yang berbeda yakni kompas.com maupun jawapos.com. Berikut tabel dari kerangka analisis model sara mills:

Tabel 3. 1 Model Kerangka Analisis Sara Mills

TINGKAT	YANG INGIN DILIHAT
Subjek-Objek	Bagaimana peristiwa dapat dilihat, dari kacamata siapa peristiwa itu dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai pencerita (subjek) dan siapa yang menjadi objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor dan kelompok social mempunyai kesempatan untuk menampilkan dirinya sendiri, gagasannya ataukah kehadirannya, gagasannya ditampilkan oleh kelompok atau orang lain.
Posisi Negara	bagaimana seseorang akan menerima dan mengakui posisinya bukan hanya sebagai individu, tetapi juga dalam hubungan dengan relasi dan kekuasaan, untuk itu hal ini sama saja dengan melihat bagaimana negara hadir dan ditampilkan dalam teks sehingga subjek akan menyadari posisinya.
Penulis-Pembaca	Bagaimana posisi pembaca dimunculkan dan berperan dalam teks. Bagaimana pembaca menempatkan dirinya dalam teks yang ditampilkan. Kepada kelompok manakah pembaca menempatkan dirinya.
Mediasi	Bagaimana strategi pemberitaan dalam teks yang menekankan unsur haru atau semacamnya dengan cara penceritaan yang mensugestikan pada pembaca untuk menematkan dirinya dalam penderitaan tokoh baik subjek ataupun objek berita. Sugesti bisa dituliskan atau dinarasikan oleh penulis secara langsung maupun tersirat atau bisa berasal dari bagaimana subjek atau objek menggabarkan atau menceritakan penderitaannya dalam teks.
Kode Budaya	Bagaimana pemberitaan mensugestikan sejumlah informasi yang dipercaya atau diakui secara bersama, dianggap sebagai kebenaran bersama. Kode Budaya juga bisa berupa klaim atas kebenaran melalui kalimat seperti: “seharusnya” atau senyatanya”, hal tersebut didasarkan atas kebiasaan yang diyakini oleh masyarakat sebagai kebenaran atau nilai mayoritas.

Sumber: Eriyanto dalam buku Analisis Wacana (Pengantar Analisis Teks Media) Tahun 2001

3.7 Kerangka kerja

Kerangka kerja dalam penelitian ini di mulai dengan tahapan mengumpulkan data pemberitaan dari dua media massa yang berbeda baik dalam nilai-nilai yang diembannya, gaya penulisan maupun penyampaian berita nya. Setelah itu berita yang terkumpul di seleksi dan dikategorikan berdasarkan pola pemberitaan (data saturated). Hal tersebut dilakukan untuk memudahkan dan memfokuskan penelitian dalam melihat konstruksi buruh migran secara jelas. Kemudian dilakukan analisis mendalam untuk melihat pemosisian aktor dalam berita di dua media pemberitaan berbeda untuk mengetahui keberpihakan media. Selanjutnya diperoleh hasil dari konstruksi tersebut yang akan menunjukkan strategi media dalam menggambarkan dan membangun sosok Buruh Migran Perempuan (BMP) di media massa dengan analisis wacana Sara Mills.

3.8 Uji Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan pembacaan teks secara mendalam mengenai pemosisian Buruh Migran Perempuan (BMP) dalam media pemberitaan, melakukan studi komparasi dari dua sumber yakni kompas.com dan jawapos.com untuk melihat tingkat konsistensi Validity dan Realibility dari perbandingan diantara keduanya serta menarik kesimpulan, dilanjutkan dengan melakukan checking data, serta mengintensifkan analisis data diperkuat dengan teori.

BAB V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konstruksi pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com terkait Buruh Migran Perempuan sebagian besar didominasi oleh permasalahan dan isu terkait Kriminalitas dan Seksualitas Politik dan Kebijakan serta Permasalahan Keluarga. Media pemberitaan sebagai saluran informasi sekaligus agen konstruksi memiliki kepentingan tersendiri untuk menginterpretasikan Buruh Migran Perempuan sedemikian rupa. Integritas dan Buruh Migran Perempuan secara objektif dan sesuai dengan fakta, akan tetapi sekalipun ditampilkan dengan netral dan tanpa keberpihakan pemberitaan terkait tiga hal di atas ternyata telah mempengaruhi dan mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan sebagai pihak yang melakukan tindak kriminal, memiliki pekerjaan yang dipandang rendah oleh masyarakat “Babu” dan objek yang diceritakan.

Pemberitaan Kriminalitas dan Seksualitas Buruh Migran Perempuan dalam Kompas.com dan Jawapos.com mengkonstruksi sosok Buruh Migran Perempuan sebagai Pelaku kriminal. Penyampaian status “tersangka” dan “korban” serta pemosisian subjek dan objek penceritaan yang seringkali bias dan menimbulkan ambiguitas mengakibatkan Buruh Migran Perempuan sering disalahpahami. Lebih lanjut, keterlibatan Buruh Migran Perempuan dalam permasalahan kriminalitas dan seksualitas cukup tinggi, sehingga memungkinkan pembaca untuk mengasumsikan dan mempersepsikan Buruh Migran Perempuan sebagai pelaku kriminal.

Terkait pemberitaan Politik dan Kebijakan Buruh Migran Perempuan Media Kompas.com dan Jawapos.com secara tidak langsung mengkonstruksi Buruh Migran Perempuan sebagai sosok “babu”. Penyematan Identitas Babu sebagai Identitas baru Buruh Migran Perempuan tidak terlepas dari senternya isu dan wacana yang berisikan agenda untuk mendeklarasikan Buruh Migran Perempuan di banyak berita. Cuittan di Media Sosial oleh Fahri Hamzah yang merupakan politisi sekaligus pejabat pemerintah mengklaim Buruh Migran Perempuan sebagai Babu menguatkan

fakta adanya upaya untuk menggugat Identitas Buruh Migran Perempuan yang sebelumnya merupakan “Pahlawan Devisa”. Pekerjaan Buruh Migran Perempuan yang distereotipekan rendah dinilai cukup untuk menempatkan Buruh Migran Perempuan pada Hierarki terbawah dalam hal status sosial.

Dalam pemberitaan Permasalahan Keluarga Buruh Migran Perempuan dikategorikan sebagai objek. Sulit bagi Buruh Migran Perempuan untuk menempatkan dirinya sebagai subjek yang setara dan memiliki ruang untuk menegosiasikan posisinya terutama dalam teks berita. Keberadaannya selalu di definisikan atau ditampilkan oleh pihak lain, dalam permasalahan keluarga Buruh Migran Perempuan tidak bisa dilepaskan dari gender inequalities baik dalam peran, maupun pekerjaan. Untuk itu, Buruh Migran Perempuan masih menjadi merupakan objek untuk dipersalahkan, objek domestifikasi dan objek peran ganda.

Komparasi Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com dapat dilihat dari pola pemberitaannya, gaya pemberitaan serta konteks berita. Dalam ketiga aspek tersebut jelas kedua media memiliki perbedaan jika dibandingkan dan disejajarkan.

Media Pemberitaan Kompas.com dan Jawapos.com mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan sebagai Pelaku Kriminal, Babu dan Objek. Dikatakan sebagai pelaku kriminal karena keterlibatan BMP dalam melakukan tindak kriminal, dianggap sebagai Babu mengingat pekerjaannya yang distereotipekan sebagai buruh kasar dibidang domestik, serta dipandang sebagai objek akibat posisinya yang selalu didefinisikan. Buruh Migran Perempuan dalam media pemberitaan memiliki posisi yang cenderung lemah dan tidak dapat menampilkan dirinya sendiri, hal tersebut membuka peluang bagi pihak lain untuk mengambil alih posisi BMP sebagai subjek pencerita.

Alasan mengapa Buruh Migran Perempuan dikonstruksi sebagai pelaku kriminal, babu dan objek disebabkan oleh implikasi budaya patriarki, kepentingan media dan perkembangan isu serta realita di masyarakat di kedua media pemberitaan yang tidak bisa dipisahkan dari asumsi dan

persepsi untuk menempatkan Buruh Migran Perempuan dengan identitas pelaku kriminal, babu dan objek.

5.2 Saran

Problematika terkait Buruh Migran Perempuan yang masih memprihatinkan dalam berbagai aspek kehidupan seharusnya menjadi pembelajaran bersama bagi setiap elemen masyarakat pemerintahan dan khususnya media untuk memberikan kesejahteraan pada Buruh Migran Perempuan. Jaminan kesejahteraan dalam bentuk perlindungan dan keadilan seharusnya menjadi pemenuhan hak-hak asasi bagi pekerja Buruh Migran Perempuan. Identitasnya sebagai Buruh atau Pekerja Rumah Tangga seharusnya juga tidak menutup akses harkat dan martabat. Kesepakatan atas persetujuannya tidak menjadi pembenaran untuk melegalkan segala macam bentuk perlakuan tidak manusiawi terhadapnya khususnya penganiayaan, praktik perbudakan dan sebagainya. Untuk alasan yang telah dijelaskan diatas maka secara eksplisit penelitian ini berusaha untuk memberikan saran :

1. Aparatur Pemerintahan

- Penetapan dan pengambilan keputusan dalam bentuk peraturan maupun kebijakan terkait Buruh Migran Perempuan harus didasarkan atas perspektif gender.
- Melindungi hak-hak Buruh Migran Perempuan dan mengupayakan kesejahteraan Buruh Migran Perempuan.
- Meminimalisir tindakan yang mengarah pada aksi *justifikasi* maupun *judgement* dalam bentuk ujaran kebencian maupun rasisme dengan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan memiliki toleransi terhadap segala macam perbedaan, mengingat negara Indonesia merupakan negara multikultural.
- Mengoptimalkan penanganan terkait permasalahan buruh migran baik secara legal formal maupun perubahan

paradigma tata kelola perlindungan buruh migran, dalam bentuk pelibatan proaktif semua elemen pemerintah media maupun masyarakat.

- Revitalisasi dan implementasi konkrit politik luar negeri yang bertujuan untuk memprioritaskan pada perlindungan Buruh Migran Perempuan.

2. Media pemberitaan

Media pemberitaan sebagai saluran informasi yang berperan dalam melakukan eksternalisasi, subjektivasi, dan internalisasi diharapkan mampu bersikap netral dan lebih bijak dalam menampilkan pemberitaan terkait Buruh Migran Perempuan. Gaya pemberitaan, penggunaan bahasa dan konteks berita selayaknya disampaikan dengan santun tanpa memanfaatkan Buruh Migran Perempuan untuk dijadikan objek atau kesempatan untuk meraih popularitas, seperti halnya demi menarik minat baca media rela mengorbankan citra Buruh Migran Perempuan. Untuk alasan yang demikian maka sebaiknya media memiliki visi dan misi yang membela kepentingan Buruh Migran Perempuan dan menyerukan semangat humanisme.

Media diharapkan menerapkan asas jurnalisme. Menyampaikan pemberitaan berdasarkan realita dan objektif tidak diskriminatif. Tidak menjadi alat bagi kepentingan golongan tertentu, sehingga konteks berita jauh dari hoax, agenda setting dan tidak profokatif. Menentukan pemosisian subjek-objek, dan posisi penulis-pembaca dengan proporsi yang seimbang dan tidak ada dominasi dari salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak dapat menampilkan dirinya tanpa diwakilkan atau diceritakan oleh pihak lain atau justru tidak memiliki kesempatan untuk menampilkan diri.

Pemosisian objek-subjek tidak berdampak pada Pemosisian penulis-pembaca, yang mana penulis tidak memanipulasi khalayak pembaca dengan kalimat profokatif. Pembaca diharapkan memiliki

ruang untuk menegosiasikan posisinya dalam teks berita, menempatkan dirinya sebagai pihak ketiga yang netral dan dapat melihat berita berdasarkan sudut pandang keduanya (Subjek-objek). Menampilkan dengan jelas posisi negara, mediasi dan kode budaya berdasarkan batas kewajaran tanpa ambiguitas.

Media pemberitaan dalam mewacanakan Buruh Migran Perempuan seharusnya tidak merugikan ataupun mendiskreditkan Buruh Migran Perempuan. Wacana yang dibangun dan konstruksi media pemberitaan Buruh Migran Perempuan sebaiknya bersifat positif sehingga tidak merusak citra BMP dan juga tidak mempengaruhi masyarakat atas wacana yang digulirkan oleh media. Adanya kepentingan media dalam dunia pemberitaan merupakan yang tidak bisa dihindari, untuk itu media pemberitaan baik kompas.com maupun jawapos.com dalam hal tersebut wajib kiranya untuk mempertimbangkan posisi Buruh Migran Perempuan. Mengambil keuntungan tanpa menyudutkan (mendiskriminasi, memarjinalisasi) kalangan Buruh Migran Perempuan.

3. Elemen masyarakat

Masyarakat merupakan elemen terpenting dan memiliki peran yang dipengaruhi oleh konstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan di media massa. Masyarakat dapat dikatakan sebagai pihak pertama yang terlibat langsung dengan Buruh Migran Perempuan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, masyarakat juga merupakan pihak yang mengadopsi hasil konstruksi dari media massa dan mengimplementasikannya sebagai pedoman ataupun pandangan untuk melihat dan memperlakukan Buruh Migran Perempuan. Menilik dari keterlibatan dan pentingnya keberadaan masyarakat terhadap kehidupan Buruh Migran Perempuan maka berikut merupakan saran yang bisa diberikan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat konstruksi identitas Buruh Migran Perempuan di media massa untuk dijadikan renungan dan pertimbangan bersama:

- Melihat dan memperlakukan Buruh Migran Perempuan sebagai bagian dari masyarakat tanpa adanya perlakuan diskriminasi maupun marginalisasi akibat konstruksi media pemberitaan.
- Tidak mudah menjustifikasi atau menghakimi suatu permasalahan berdasarkan satu sudut pandang, tidak langsung menerima ataupun membenarkan sebuah berita tanpa menelusuri kebenarannya lebih jauh agar tidak termakan berita profokatif yang bisa jadi merupakan berita hoax.
- Mampu menahan diri dari membuat statement atau komentar di media massa yang mengandung *hate speech*. Hal ini merupakan langkah antisipasi untuk menghindari terciptanya masyarakat yang reaksioner, masyarakat yang bertindak tanpa pertimbangan.
- Media pemberitaan dapat leluasa untuk mengkonstruksi Identitas Buruh Migran Perempuan tetapi keputusan akhir mengenai sukses tidaknya konstruksi ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Untuk itu diharapkan bagi masyarakat untuk lebih selektif dan kritis dalam melihat, menilai pemberitaan dengan lebih adil dan bijak sehingga dapat mewujudkan terbentuknya masyarakat yang bernalar kritis.
- Masyarakat berdasarkan pemosisian penulis-pembaca seharusnya dapat menganalisis dan mengintegrasikan dirinya dalam suatu teks berita. Sehingga memiliki idealisme atau prinsip sendiri agar dapat menemukan kebenaran dibalik sebuah teks berita.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Aliah, D. Y. (2014). *Analisis Wacana Kritis dalam Multiperspektif*. Bandung: Refika Aditama.
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana Media
- Badara, A. (2014). *Analisis Wacana Teori, Metode dan Penerapannya pada Wacana Media*. Edisi ketiga. Jakarta: Prenada Media.
- Bungin, B. (2006). *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Diana B. Winch, D. W. (1989). *Migration and Motivation :The Migrant's Perspective*. New York: Mc Master University.
- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana Pengantar Analisis Media*. Yogyakarta: LKis Printing Cemerlang.
- Eriyanto. (2002). *Analisis Framing Konstruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Faqih, M. (2012). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mills, S. (2007). *Diskursus*. Terjemahan oleh Ali Noer Zaman. Jakarta: Qalam.
- Prabasmoro, A. P. (2006). *Kajian Budaya Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Rochimah, T. H. (2018). *Pertarungan Wacana Tubuh Perempuan dalam Media*. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
- Sara Mills, L. M. (2011). *Language, Gender and Feminism*. New York: Routledge.
- Solidaritas Perempuan. (2014). *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarga di Negara*. Jakarta: Solidaritas Perempuan (women's solidarity for Human Right).
- Suseno, Franz Magnis. (1992). *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanius.
- Suwandi, S. (2008). *Semantik Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.

Jurnal:

- Alvian. (2015). *Konstruksi Perempuan dalam Pemberitaan Kematian Angeline pada SKH Republika Edisi 11 sampai 17 Juni 2015*. Universitas Negeri Yogyakarta, 73.
- Fauziah, A. T. (2015). *Representasi Perempuan Dalam Pemberitaan KDRT di Media Massa Pada Masyarakat di Wilayah Jakarta (Studi Pemberitaan Kekerasan di Kompas.com dan Merdeka.com)*. PROMEDIA, VOLUME I, NO 1, , 131-158.
- Fauziyah. (2010). *Analisis Wacana Pemberitaan Kekerasan Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di Harian Umum Republika (Edisi 22 November-25 November 2010)*. 2011: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Handayani.(2013).*Peran Gender dalam Tradisi Kolak Ayam*. AntroUnair, 255-267, Vol.2 No.1.
- Hasanah, U. (2013). *Pembentukan Identitas Diri dan Gambaran Diri pada Remaja Putri Bertato di Samarinda*. *E-Journal Psikologi*, 10.
- Hardisman,Firdawati,dkk. (2018). *Model Determinan Pelaku "Lelaki Seks Lelaki" di Kota Padang Sumatera Barat*.Jurnal FK Unand, 9.
- Pratiwi, N. N. (2014). *KAJIAN SOSIOLOGIS BENTUK-BENTUK KRIMINALITAS DI ANGKUTAN UMUM (Studi Pada Korban Tindak Kriminalitas di Angkutan Umum Daerah Bandar Lampung*. Lampung: UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Mills, S. (2008). *Language and sexism*. Cambridge University Press, 13.
- Syafruddin. (2002). *PERANAN KORBAN KEJAHATAN (VICTIM) DALAM TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA KEJAHATAN DITINJAU DARI SEGI VICTIMOLOGI*. Medan: USU digital Library.
- Salman, L. (2009). *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*. *Jurnal Hukum* , 1-17,no1 Vol 16.
- Setiawan, Y. B. (2011). *Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka*. *Jurnal Ilmiah Komunikasi /MAKNA Vol. 2 no. 1, , 8*.
- YULI, R. (2016). *DINAMIKA PENGUNGKAPAN IDENTITAS SEKSUAL PADA PELAKU LSL (LAKI-LAKI YANG BERHUBUNGAN SEKS DENGAN LAKI-LAKI) DI KOTA PADANG*. Padang: UNIVERSITAS ANDALAS. (Diploma thesis).

Web:

Kompas.com:

<https://www.kompas.com>

Jawapos.com:

<https://www.jawapos.com/>

Similarweb.com:

<https://www.similarweb.com/>

Baca Laporan Pengolahan Data BNP2TKI:

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12092018_095527_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_AGUSTUS.pdf diakses pada 21/09/2018 Diakses pada pukul 18:27

Baca Berita BBC:

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43454033> (Diakses dari media pemberitaan BBC, tanggal 02/05/2019, pada pukul 21:27 WIB)

Perempuan, L. K. (2008, Maret 7). *komnasperempuan.go.id*. Dikutip April 2019, dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2018: : https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf.

ⁱ Baca Laporan Pengolahan Data BNP2TKI:

http://www.bnp2tki.go.id/uploads/data/data_12092018_095527_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2018_-_AGUSTUS.pdf diakses pada 21/09/2018 Diakses pada pukul 18:27

ⁱⁱ Baca ILO tentang Organisasi Perburuhan International:

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_117195.pdf

ⁱⁱⁱ Baca Berita BBC:

TKI dipancang: Jumlah eksekusi di Arab Saudi naik duakali lipat sejak 2017

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43454033> (Diakses dari media pemberitaan BBC, tanggal 02/05/2019, pada pukul 21:27 WIB).

^{iv} Baca Buku :

Solidaritas Perempuan.(2014). *Situasi Kekerasan dan Pelanggaran Hak Buruh Migran Perempuan dan Keluarga di Negara.Jakarta: Solidaritas Perempuan(women's solidarity for Human Right)*

^v Baca Data Pernikahan Dini: <http://www.kpai.go.id/utama/pernikahan-dini-negara-harus-selamatkan-generasi>

^{vi} Baca CATAHU:

https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lembar%20Fakta%20Catahu%207%20Maret%202018.pdf

Lampiran

Ibunda TKW Tuti: Anak Saya yang Diperkosa, Mengapa Malah Dieksekusi Mati?

Kompas.com - 06/11/2018, 10:49 WIB



MAJALENGKA, KOMPAS.com — Wajah Iti Sarniti (52) digelayuti kesedihan yang dalam. Sebentar-sebentar dia mengusapkan punggung pergelangan tangan pada kedua kelopak matanya. Ibunda dari Tuti Tursilawati (33), tenaga kerja wanita (TKW) yang dieksekusi mati di Arab Saudi pada Senin (29/10/2018) waktu setempat itu, berkali-kali mengucap tanya.

"Mengapa anak saya dihukum mati? Dia korban perkosaan, mengapa bukan yang memerkosanya yang dihukum, malah dia yang dieksekusi mati?" ungkap Iti lirih saat dijumpai di rumahnya di Desa Cikeusik, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Rabu (31/10/2018). Baca juga: Sedih Dengar Berita Tuti Tursilawati, Ridwan Kamil Kaji Larangan Warga Jabar Jadi TKI Tuti yang bekerja di Kota Thaif, Arab Saudi, dituduh membunuh majikannya, Suud Malhaq Al Utibi, pada 2010.

Dia dieksekusi mati tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada keluarga. "Saya kaget dan sempat enggak percaya karena infonya sangat mendadak," tambah Iti. Iti yang mengenakan kerudung bercorak hitam putih itu tampak berusaha tegar meski tidak bisa menutupi kesedihannya. Pasalnya, pasca-eksekusi mati, jenazah Tuti Tursilawati tidak bisa dipulangkan ke Indonesia. Dia mengaku hanya menerima informasi bahwa jenazah anak sulungnya tersebut telah diurus Kerajaan Arab Saudi.

"Soal jenazah Tuti sudah diurus dan dikubur di Arab," ujar Iti. Menurut dia, kabar pemakaman jasad Tuti diterima berbarengan dengan informasi bahwa Tuti telah dieksekusi mati. "Sedih iya, kecewa juga iya, apalagi informasinya sangat mendadak," ujarnya. Kepala Desa Cikeusik, Jaenudin, menuturkan, pemerintah melalui Kemenlu RI telah berupaya maksimal untuk membebaskan Tuti. "Saya tahu sendiri pemerintah memperjuangkan betul dan membantu all out, dari awal mengawal terus kasus Tuti," ujar Jaenudin saat ditemui di rumah Tuti Tursilawati, Selasa (30/10/2018).

Berdasarkan informasi yang diterimanya, perwakilan Konsulat Jenderal RI (KJRI) Thaif setiap bulannya menjenguk Tuti di tahanan. Selain itu, Kemenlu juga rutin menggelar pertemuan dengan pihak keluarga setiap tahun. Dalam pertemuan itu, menurut Junaedi, Kemenlu menyampaikan perkembangan kasus Tuti dan upaya apa saja yang telah ditempuh.

"Saya beberapa kali ikut, pertemuan itu juga membahas upaya ke depannya seperti apa," kata Jaenudin. Suasana rumah duka Tuti Tursilawati TKI yang dihukum mati di Arab Saudi di

kediamannya di Desa Cikeusik, Majalengka, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018). Tuti dinyatakan bersalah oleh pengadilan Arab Saudi karena kasus pembunuhan dan telah dieksekusi mati pada Senin (29/10) lalu. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.

(Dedhez Anggara) Sangat kecewa Jaenuddin juga mengaku sangat kecewa karena tidak ada pemberitahuan lebih dahulu mengenai eksekusi terhadap Tuti. "Sangat kecewa kepada Pemerintah Arab Saudi, mereka baru memberitahu setelah Tuti dieksekusi," ujar Jaenudin. "Keluarga sangat kecewa, seharusnya sebelum dieksekusi ada pemberitahuan ke keluarga," tuturnya. Menurut Jaenudin, sebelum dieksekusi, dia sering melihat langsung almarhumah Tuti menghubungi keluarganya melalui sambungan telepon.

"Ya kadang ikut ngobrol juga, sekadar tanya kabar dan kasih semangat," kata Jaenudin. Dia mengatakan, Tuti biasanya menelepon keluarga setiap satu bulan sekali. Tuti menelepon menggunakan ponsel petugas Konsulat Jenderal RI (KJRI) Thaif yang menjenguknya. Selain telepon, menurut dia, sesekali Tuti juga menghubungi keluarganya melalui video call.

"Komunikasi itu rutin. Petugas KJRI menjenguk Tuti minimal satu kali setiap bulannya," ujar Jaenudin. Menurut Jaenudin pula, kabar eksekusi juga tidak disampaikan Kerajaan Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Pemberitahuan itu baru disampaikan ke Kemenlu RI setelah proses eksekusi terhadap Tuti dilaksanakan.

Jaenudin mengatakan, pihak keluarga baru mendapat kabar dari petugas Kemenlu RI bahwa Tuti telah dieksekusi mati pada Selasa (30/10/2018) dinihari sekitar pukul 01.00 WIB. "Dari Kemenlu menelepon ke keluarga, jenazahnya juga sudah diurus dan dikuburkan di Arab Saudi," ujar Jaenudin. Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ibu Tuti Tursilawati Histeris, 'Dia Korban Perkosaan, Mengapa Dihukum Mati?.'

Aniaya Berat TKW 19 Tahun, Majikan Divonis Ringan Pengadilan Malaysia

17 Maret 2018, 15:56:26 WIB

JawaPos.com – Kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) asal Indonesia oleh majikan seakan tidak pernah berhenti. Mirisnya, posisi tenaga kerja kerap lemah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Malaysia. Seorang majikan yang melakukan penganiayaan berat dijatuhi hukuman ringan oleh pengadilan Malaysia.

Vonis ringan itu dijatuhkan Hakim Malaysia terhadap Rozita Mohamad Ali di Mahkamah Petaling Jaya pada Kamis (15/3). Dia memang dinyatakan bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap Suyantik, perempuan 19 tahun asal Kisaran, Sumatera Utara. Namun, vonisnya tidak sebanding dengan luka yang diderita Suyantik.

Oleh hakim, Rozita Mohamad Ali dijatuhi hukuman denda MYR 20 ribu atau sekitar Rp 70,3 juta. Tanpa ada hukuman badan karena selain denda, Rozita hanya diminta menunjukkan kelakuan baik selama lima tahun. "Padahal, Suyantik mengalami luka-luka permanen akibat penganiayaan keji tersebut," ujar Direktur Eksekutif Migrant CARE Wahyu Susilo.

Luka yang diderita Suyantik memang parah. Ada cedera pada kedua-dua belah mata, tangan dan kaki, organ dalam, pendarahan beku di bawah kulit kepala, patah tulang serta patah belikat kiri. "Tapi Mahkamah Petaling Jaya menjatuhkan vonis yang teramat ringan terhadap Rozita Mohamad Ali," imbuhnya.

Kisah pilu Suyantik terungkap saat dia ditemukan dalam keadaan mengemaskan di selokan daerah Damansara, Kuala Lumpur, Kamis 21 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 WIB. Terdapat luka di sekujur tubuhnya. Saat diperiksa itulah, daftar luka-luka bermunculan.

"Menurut laporan, majikan menganiaya Suyantik dengan menggunakan pisau, alat pel, payung, setrika dan gantungan baju," ungkapnya.

Namun, itu semua tidak membuat Hakim Mohamed Mokhzani Mokhtar menjatuhkan hukuman berat untuk Rozita. Migrant CARE bukan hanya menganggap vonis tersebut terlalu ringan, tetapi juga menemukan kejanggalan dalam proses peradilan. Misalnya, soal dakwaan yang awalnya dituduhkan melanggar Pasal 307 UU Kekerasan Malaysia.

Dalam pasal itu, disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku yang terbukti bersalah adalah penjara maksimal 20 tahun. Namun, dakwaan tiba-tiba diubah ke Pasal 326 UU Kekerasan tentang kekerasan menyebabkan luka parah. Jika dinyatakan bersalah, Rozita bisa dikenakan penjara 20 tahun dan denda atau hukum cambuk. Tetapi, pasal itu tidak dipakai sebagai dasar vonis.

Hakim memilih untuk menjatuhkan vonis berdasarkan Pasal 324 UU Kekerasan yang berisikan kesengajaan menyebabkan cedera terhadap Suyantik. Ancaman hukumannya makin ringan. Yakni, tiga tahun penjara, atau denda, atau hukum cambuk. Dari tiga itu, bisa dipilih dua vonis atau cuma satu.

Nah, hakim memilih denda sebagai vonis utama. Lantas, ditambahkan dengan kewajiban berbuat baik selama lima tahun. Itulah yang menjadi dasar kenapa hukuman terhadap Rozita menjadi sangat ringan. Migrant CARE menyatakan kekecewaannya

"Atas keputusan dan kejanggalan yang terjadi, Migrant CARE menyatakan kekecewaannya dan hasil investigasi tersebut menjadi bahan acuan pengajuan banding atas putusan yang tidak adil," tegas Wahyu.

Selain itu, Migrant CARE juga mendesak Pemerintah Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur agar benar-benar serius memonitor proses peradilan terhadap kasus-kasus yang dihadapi oleh buruh migran Indonesia. Sampai berita ini ditayangkan, JawaPos.com belum mendapatkan konfirmasi dari Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia.



Jaringan Buruh Minta Pemerintah RI Tak Buru-buru Eksekusi Marry Jane

LUTFY MAIRIZAL PUTRA Kompas.com - 14/09/2016, 10:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan meneruskan esekusi mati Marry Jane Veloso. Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Istana Negara, Jakarta, Jumat (9/9/2016) lalu.

Koordinator JBMI Hongkong - Macau, Sringatin mengatakan keputusan Presiden Jokowi menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib buruh migran korban perdagangan manusia dan sindikat narkoba.

"Marry Jane hanya korban seperti halnya puluhan perempuan migran Indonesia yang juga sedang terancam hukuman mati diluar negeri. Apalagi kasus hukum di Filipina menuntut perekrut yang menjebakny juga masih berlangsung. Apakah pemerintah Indonesia akan mengeksekusi korban yang sedang menuntut keadilan?" kata Sringatin dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2016). (Pemosisian Objek)

Sringatin menuturkan pihaknya menolak alasan adanya izin dari Duterte sebagai dasar untuk meneruskan rencana eksekusi Marry Jane. Keputusan itu, lanjut dia, tidak mempertimbangkan nasib 209 buruh migran Indonesia di luar negri yang terancam hukuman mati, di mana 63 orang di antaranya adalah perempuan.

"Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejak 2007. Maka sudah sewajibnya pemerintah menegakkan keadilan dan perlindungan bagi korban seperti Marry Jane, Merri Utami dan korban-korban lainnya sesuai amanat peraturan ini," ujar Sringatin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, Presiden Filipina Rodrigo Duterte mempersilakan aparat hukum Indonesia untuk mengeksekusi terpidana mati Marry Jane Veloso.

"Presiden Duterte menyampaikan, silakan diproses sesuai hukum yang ada di Indonesia. Artinya kan jelas," ujar Jokowi di Terminal Petikemas Kalibaru Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (13/9/2016).

Pernyataan Duterte bahwa Marry Jane mesti diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia ditangkap Jokowi sebagai bentuk penghormatan Filipina terhadap putusan pengadilan atas Marry Jane, yakni hukuman mati."Gimana sih? Kan sudah sangat jelas beliau hormati proses hukum yang ada di sini. Ya, sudah," ujar Jokowi.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi ketika diminta tanggapan bantahan dari Kementerian Luar Negeri Filipina terkait Marry Jane. Kemenlu Filipina menyebutkan, Duterte belum memberikan "lampu hijau" terkait eksekusi Marry Jane.

TKW Asal Madura Gagal Selundupkan 925 Gram Sabu

27/03/2018, 15:14 WIB | Editor: Sofyan Cahyono



JawaPos.com - Otoritas Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Juanda kembali meringkus tersangka kasus narkoba. Adalah perempuan berinisial S, 36. Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Madura itu kedapatan mencoba menyelundupkan sabu seberat 925 gram.

Kepala KPPBC Juanda Budi Harjanto mengatakan, S diringkus di Bandara Juanda setelah terbang dari Kuala Lumpur, Malaysia. Sama seperti penumpang lainnya, S melewati pemeriksaan X-ray di pintu keluar kedatangan internasional.

"Saat dibuka, tersangka membawa rice cooker yang isinya bawang putih dan merah," ungkap Budi kepada wartawan di kantor KPPBC TMP Juanda, Selasa (27/3).

Tak mau kecolongan, petugas lalu membongkar rice cooker milik tersangka. Akhirnya ditemukan beberapa bungkus plastik berisi sabu di selipkan di pinggir rice cooker.

S pun langsung digelandang petugas ke kantor KPPBC Juanda. Dari hasil interogasi sementara, tersangka mengaku dititipi seorang bandar tak dikenal dari Malaysia.

Tersangka mengaku diupah Rp 40 juta jika berhasil menyerahkan sabu kepada seorang bandar di Madura. "Tersangka dapat diringkus dengan mudah karena sebelumnya kami pernah menangkap aksi penyelundupan dengan modus serupa," kata Budi.

Tak hanya S, Otoritas KPPBC TMP Juanda juga menggagalkan aksi penyelundupan sabu lainnya. Tersangka berinisial P, 26, warga Madura. Dia mencoba menyelundupkan sabu seberat 137 gram di dalam anus.

Pemuda pengangguran yang kerap jadi joki balap liar tersebut sempat diajak seorang kenalan ke Malaysia. Selama 14 hari di Negeri Jiran, P hanya bersenang-senang di sebuah hotel di Kuala Lumpur.

Saat teler usai menghisap sabu di salah satu diskotek di Malaysia, P dicekoki dua kondom yang sudah diisi sabu. Lalu dimasukkan ke dalam anus tersangka. P dijanjikan upah sebesar Rp 20 juta.

"Memang dia sengaja diberangkatkan dari Madura ke Malaysia oleh kenalannya di sana (Kuala Lumpur). Di sana hidupnya dijamin. Diservis, hura-hura dan nggak ada kerjaan," ungkap Budi.

Kabid Rehab BNNP Jatim AKBP Toni Sugianto menambahkan, pihaknya mencatat sejumlah bandar dari 11 negara yang punya koneksi di Indonesia. Misalnya, bandar narkoba di Tiongkok dan Thailand. Mereka kerap mencoba memanfaatkan WNI untuk menyelundupkan barang haramnya ke Indonesia. "Mereka biasanya memanfaatkan TKI ilegal yang pulang kampung," imbuh Toni.

Mangga Indramayu dan Eksploitasi Tubuh Perempuan

DIAN PURNOMO Kompas.com - 12/01/2019, 20:47 WIB

APA yang muncul di kepala tentang Indramayu? Mangganya yang enak? Perempuannya yang cantik? Atau keduanya secara bersamaan? Dua tahun lalu, pada saat menyelesaikan tugas akhir kuliah, saya menghabiskan beberapa waktu tinggal di Indramayu untuk mengumpulkan data. Indramayu—satu kabupaten di Jawa Barat—bukan tempat yang asing buat saya. Sebelumnya, bersama OnTrackMedia Indonesia, saya wara-wiri di sana untuk melakukan kampanye migrasi aman.

Mendengar reputasi mangga yang enak sampai cerita eksploitasi perempuan di sana, sudah bukan hal baru lagi bagi kami. Saking bangganya Indramayu terhadap produksi mangga di wilayahnya, jika Anda mengunjungi kota kecil ini maka hampir pasti akan melewati Tugu Mangga di wilayah Simpang Lima.

Persimpangan jalan ini adalah jalur wajib dari arah Barat menuju Cirebon atau ke Balongan. Di desa Bongas tempat saya melakukan penelitian, setiap rumah memiliki pohon mangga. Ketika sedang kompak berbuah semua, pohon-pohon mangga ini menjadi suguhan mata yang indah.

Namun, tidak pernah terpikir bahwa orang akan menghubungkan mangga dengan subyek penelitian saya, yaitu perempuan khususnya anak perempuan yang dilacurkan. Sampai, salah seorang narasumber menyampaikan kaitan itu dalam wawancara.

“Perempuan Indrayamu itu seperti mangga, Bu,” kata informan tersebut, yang tetap melanjutkan ceritanya bahkan ketika melihat mata saya sudah nyaris keluar setengah. “Jadi gini lho. Mangga Indramayu itu kan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi kelezatannya.

Jadi banyak pedagang mangga yang suka ngaku-ngaku kalau mangganya dari Indramayu, padahal bukan. Nah, perempuannya juga gitu. Karena yang terkenal enak, bersih, dan cantik, mohon maaf, ya perempuan Indramayu, makanya banyak yang ngaku-ngaku dari Indramayu.

”Kemudian, dia menambahkan kalau sebenarnya sekarang ini sudah tidak banyak lagi perempuan apalagi anak dari Indramayu yang luruh duit. Ini istilah yang dipakai untuk menghaluskan pekerjaan sebagai orang yang dilacurkan. Menurut dia, rata-rata yang bekerja ke luar daerah itu bekerja di pabrik atau jadi asisten rumah tangga.

Bisa jadi informan saya benar. Karena pendataan yang kacau, siapa pun bisa memiliki identitas lebih dari satu. Karenanya, orang mudah saja mengaku dari Indramayu, asalkan KTP-nya berbunyi begitu. Namun, pernyataan bahwa tidak banyak lagi anak dan perempuan yang dilacurkan itu sangat debatable.

Penelitian saya masih menemukan kasus anak yang dilacurkan, ada lebih dari dua anak di satu desa. Maka, ini berarti masalah eksploitasi seksual anak khususnya di Indramayu masih belum selesai. Tidak bisa berlega dan bangga hati dengan mengatakan sudah tidak banyak lagi anak yang dilacurkan.

Konstruksi sosial Kembali ke mangga. Cara bapak tadi menganalogikan perempuan seperti mangga itu rasanya sangat menyedihkan. Dan rupanya si bapak ini bukan satu-satunya orang yang berpendapat serupa. Sejak pertama mendengar pernyataan tersebut, rasanya seperti echo, berulang-ulang saya mendengar pernyataan yang sama. Jika dibaca dengan menggunakan teori konstruksi sosial, bahasa punya peranan penting dalam proses obyektivikasi terhadap tanda-tanda.

Bahasa adalah representasi simbolis yang mewakili kehidupan sehari-hari. Jadi, perumpamaan perempuan seperti mangga Indramayu oleh narasumber tersebut bukan kebetulan belaka semata karena di Indramayu banyak mangga. Jika dihubungkan dengan eksploitasi, tubuh perempuan dihargai tidak lebih dari komoditas perdagangan "sekelas" mangga.

Mau dijual Rp 50.000 atau Rp 80 juta, tetap tubuh perempuan adalah barang yang didagangkan. Dan, berbicara tentang barang dagangan, negara kita sejatinya masih "terjajah" dan kita tanpa disadari meletakkan diri sebagai bangsa terjajah sampai ke akar-akarnya. Kali ini, bentuk penjajahan itu tidak lagi melibatkan senjata tetapi jauh lebih terselubung sampai nyaris tidak terasa.

Yang diperebutkan apa? Kapital alias modal. Semua hal diarahkan untuk memberikan keuntungan maksimal pada pemilik modal. Dari cerita yang saya dengar ketika berada di Batam, Ambon, sampai Papua, demikianlah nasib perempuan yang dieksploitasi secara seksual sebagai pekerja seks.

Ketika masih muda dijual di Ibu Kota atau wilayah perbatasan seperti Batam. Semakin tua dan tidak lagi mulus kulitnya, dilempar ke arah semakin ke Timur, dengan harga yang lebih murah. Begitu juga mangga. Yang terbaik dijual ke supermarket sebagai barang dagangan kualitas ekspor dan ditemplei stiker merek terbaik. Begitu keriput dan tidak segar lagi, mangga ini dibuang ke pasar yang lebih murah atau dipotong-potong supaya tidak tampak kulitnya.

Di Ambon pada salah satu kunjungan ke Batumerah, saya banyak bertemu dengan teman-teman pekerja seks dari Jawa. Mereka menguatkan dugaan itu, bahwa Ambon adalah kota ke sekian yang sudah mereka tinggali untuk "bekerja". Indikator kepindahan dari kota satu ke kota lainnya tak lain adalah fisik dan usia semata.

Kapitalisasi perempuan Di dunia kapitalis, perempuan selalu menjadi pihak yang termarginalkan. Ketika semua diukur dengan skala materi, pada saat kebutuhan rumah tangga juga menjadi tidak masuk akal lagi untuk dipenuhi, perempuan adalah pihak yang dipaksa pergi ke luar rumah dan bekerja dengan bekal pendidikan yang tidak disiapkan untuk hal tersebut. Ketika giliran bersekolah, anak laki-laki didahulukan dengan alasan nanti akan menjadi kepala keluarga, pencari nafkah utama.

Namun, pada kenyataannya ketika laki-laki mengalami kesulitan mencari nafkah maka perempuan yang harus maju dengan menggunakan bekal tubuhnya. Dari mulai buruh kasar, asisten rumah tangga, pekerja kantor, sampai pekerja seks, tubuh-tubuh perempuan dijajakan sama halnya seperti mangga.

Di salah satu agen pengiriman buruh migran, jelas sekali foto-foto para calon buruh migran perempuan dipajang dan calon majikan memilih mereka berdasarkan foto dan sedikit keterangan tentang kemampuan berbahasa dan lainnya.

Di dunia kapital, perempuan juga dipengaruhi habis-habisan sesuai kepentingan pemilik modal. Kulit putih, rambut lurus, badan kurus, yang mana beberapa hal tersebut tidak sesuai dengan kondisi perempuan di seluruh muka bumi.

Dampaknya? Perempuan mati-matian berusaha untuk menjadi seperti citra kapital tersebut. Siapa yang paling diuntungkan? Tentu saja pemilik modal. Tubuh perempuan dikontrol tidak hanya oleh laki-laki, tetapi juga oleh masyarakat umum, oleh sistem. Menyedihkan. Harus ada revolusi pola pikir terhadap perempuan. Perempuan adalah manusia yang sama seperti gender lain, yang bukan hanya terdiri atas daging dan darah tetapi juga nyawa yang bersamanya melekat hak dan martabat sebagai manusia

Aksi Dewasa Ngobong Ati, Ternyata Bukan TKW Banyuwangi

Jawapos 22 Mei 2016, 21:13:00 WIB

JawaPos.com BANYUWANGI - Teka teki di balik hebohnya video dewasa lagu Ngobong Ati akhirnya terbongkar. Bukan karena aksi kepolisian tapi ada seseorang yang mengaku bertanggung jawab atas beredarnya video tersebut.

Jawa Pos Radar Banyuwangi melaporkan, pemilik akun Smule Igor Agath Sebastia yang menyanyikan lagu Banyuwangi berjudul “Ngobong Ati” sambil beradegan panas bernama Tatik, 32 asal Kabupaten Bojonegoro.

Wanita itu kini tinggal di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Identitas pelaku karaoke sambil indehoi itu diketahui setelah akun Facebook (FB) Cisca Shandy mengunggah video permintaan maaf Tatik bersama seorang lelaki yang ikut menyanyi sambil beradegan dewasa melalui aplikasi Smule tersebut.

“Awalnya, kami keluarga Ikawangi Taiwan menggelar sayembara, dan hasilnya justru ada rekaman yang mengunggah permintaan maaf itu,” ujar Ketua Ikawangi Taiwan di Banyuwangi, Krishnadi seperti yang dilansir Radar Banyuwangi, Minggu (22/5).

Seperti diketahui, aksi sepasang insan berlainan jenis di video aplikasi Smule dari akun IgorAgathSebast beredar secara viral di media sosial.

Dalam video tersebut, salah seorang mempertontonkan aksi layaknya suami istri. Sementara perempuan lainnya asyik menyanyikan lagu berjudul Ngobong Ati.

Video tersebut berdurasi 5 menit 12 detik. Ada banyak perempuan yang terlihat, tapi yang mempertontokan aksi bercinta itu begitu cuek. (Pemosisian Penulis)

Sementara wajah lelaki hanya sesekali muncul di layar. Di tengah menyanyikan lagu, sang perempuan sesekali terdengar mendesah. **(ddy/c1/abi)**

Tertangkap Basah Berbuat Mesum, TKW Ini Malah Ajak Polisi "Selfie"

GROBOGAN, PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO Kompas.com - 01/06/2017, 16:05 WIB
GROBOGAN, KOMPAS.com - **Seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) tertangkap basah sedang berbuat mesum dengan lelaki selingkuhannya di sebuah tempat kos di wilayah Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (1/6/2017) siang.**

Perempuan berinisial S (40), warga Tulungagung, Jawa Timur, ini terjaring razia Satuan Sabhara Polres Grobogan. S yang masih tercatat bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) di Hong Kong itu kedatangan sekamar berdua dengan seorang pria berinisial S (45), warga Toroh, Grobogan, Jateng.

Berulang kali polisi menggedor pintu kamar yang dihuni pasangan bukan muhrim ini, namun tak ada respons. Hingga akhirnya polisi mendobrak pintu kamar yang berada paling ujung itu. Ada belasan kamar di tempat kos yang berlokasi tak jauh dari Mapolres Grobogan ini.

Begitu pintu kos terbuka, S yang masih berstatus suami orang ini, tampak hanya berbalut handuk. Sementara si pria, yang mengenakan kaos dan celana pendek, pura-pura tertidur di atas ranjang. "Maaf saya lagi mandi. Ada apa ya?" tanya S kepada polisi. Oleh polisi, S kemudian dipersilakan mengenakan pakaian, sembari dijelaskan jika sedang ada razia tempat kos.

"Kami ini bertunangan dan akan menikah usai Lebaran," ucap S. Setelah didata, ternyata S sudah bersuami dan memiliki dua anak di Tulungagung, Jatim. Adapun si pria juga berstatus suami orang.

Mereka akhirnya tak berketik dan diangkut masuk ke dalam truk polisi. S yang merantau di negeri orang selama dua tahun ini mengaku sedang cuti kerja. Di hadapan polisi, bukannya malu, S malah bertingkah manja dan bahkan berulang kali mengajak foto selfie polisi.

"Puasa-puasa bukannya menambah pahala malah berbuat mesum," kata Kasat Sabhara Polres Grobogan, AKP Lamsir.

Dalam beberapa jam saja, belasan personel Satuan Sabhara Polres Grobogan sudah menggelandang enam pasangan mesum dari beberapa tempat kos di perkotaan wilayah Purwodadi. Rencananya, razia tempat kos yang digelar pada pukul 11.00 WIB ini akan dilanjutkan hingga Sore hari. "Akan kami beri pembinaan dan didata di Mapolres Grobogan," kata Lamsir.

Solusi Masalah Seks Buruh Migran

Oleh Hudi Winarso

*) ahli kesehatan reproduksi, dekan Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra Surabaya

KASUS penemuan jenazah bayi di tempat sampah toilet pesawat Etihad rute Abu Dhabi Jakarta pada sabtu (6/1) benar-benar membuat miris. Pelakunya diduga Hani, 37, perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, yang menjadi buruh migran (TKI) di Uni Emira Arab (UEA).

Kasus tersebut bisa jadi fenomena gunung es. Artinya, hanya satu dari sekian banyak kasus yang terungkap akibat permasalahan seks pada buruh migran. Selain masalah aborsi, masalah seks buruh migran adalah terjangkit infeksi menular seks (IMS) dan hubungan gelap yang memicu goyahnya bahtera rumah tangga.

TKI dan Risiko Seks

Tenaga kerja indonesia (TKI) yang mengadu nasib ke luar negeri merupakan sosok-sosok pemberani sekaligus tangguh. Hidup di negeri orang, jauh dari keluarga, dengan tingkat stres yang relatif tinggi karena dituntut kerja keras, yang kinerjanya akan dinilai dengan imbalan sejumlah uang.

Latar belakang para TKI juga sangat beragam. Data BNP2TKI (Badan nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) membeberkan bahwa tingkat pendidikan para TKI adalah sekolah dasar (33%), SMP(37%), SMA(25%), diploma(4%), sarjana(0,92%), dan pascasarjana(0,05%). Sedangkan kabupaten/kota asal terbanyak adalah Lombok Timur, Indramayu, Cilacap, Cirebon, Lombok Tengah, Cianjur.

Pada TKI dengan tingkat stres yang tinggi dan jauh dari keluarga. Yang sudah berkeluarga menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk tetap mempunyai komitmen tidak melakukan seks di luar nikah. Menurut Maslow, seks merupakan kebutuhan dasar manusia, juga seks bisa menjadi sarana pelepas stres (rekreasi).

Bahwa risiko dari seks bebas, selain kehamilan, abortus, dan risiko terjangkit IMS, bagi yang sudah menikah umumnya akan meningkatkan risiko kehancuran bahtera rumah tangga.

Terhadap risiko terjangkit IMS, semakin beragam pasangan seksnya, akan semakin besar risiko terjangkit infeksi menular seks. IMS jenis kencing nanah (GO) dan sifilis akan mudah diketahui dari tanda dan gejala yang muncul. Sedangkan HIV, *khlamydia*, dan hepatitis tidak dengan mudah diketahui, kecuali periksa laboratorium.

Seks TKI dan diluar nikah potensial terjadi. Namun, berbagai risiko bisa diminimalkan jika ada intervensi dalam konsep *soft skill* (pengetahuan) dan *hard skill*(keterampilan), selain pembekalan terkait pekerjaan saat jadi TKI.

Bahwa para TKI berangkat keluar negeri, faktor dominan utama pastinya untuk alasan ekonomi. Kalau punya pekerjaan atau usaha di negara sendiri, dengan pendapatan yang memadai, mereka tak perlu harus menjadi TKI di luar negeri.

Dalam *entrepreneurship* terdapat empat prinsip tahapan yang dilakukan. Pertama, membangun empati untuk peka terhadap masalah/fenomena. Kedua, menyusun rencana solusi untuk mendapat manfaat. Ketiga, melaksanakan rencana/*calculated risk taker*. Keempat, mengevaluasi pelaksanaan untuk bisa dilakukan perbaikan. Juga dalam melakukan usaha, harus berangkat dari kebutuhan masyarakat atau kebutuhan pasar.

Kesehatan Reproduksi

Sebagian besar TKI memiliki tingkat pendidikan tidak tinggi. Mereka berasal dari daerah dengan latar belakang masalah ekonomi. Dengan demikian, mereka perlu diberi bekal masalah kesehatan reproduksi.

Materi kesehatan reproduksi untuk TKI, antara lain, seputar seksualitas manusia, risiko IMS, dan dampak terhadap kesehatan reproduksi, lahirnya anak cacat (teratologi), kekurangan suburan (infertilisasi), aborsi dan dampaknya serta aspek hukum, kontrasepsi untuk mencegah kehamilan, perawatan organ reproduksi, menstruasi, kehamilan, dan kesetaraan gender.

Kasus terkait seks bisa terjadi, antara lain, karena korban tidak mengetahui yang seharusnya (bujuk rayu), tidak menyadari dampaknya, dan ketidakberdayaan.

Pengetahuan yang kurang tentang seksualitas manusia akan membuat seorang wanita potensial menjadi korban, misalnya “bujukan bahwa hubungan seks yang hanya sekali tak akan menyebabkan kehamilan”. Hal tersebut tidak benar karena jika sekali tersebut terjadi saat masa subur (ovulasi), potensi terjadi kehamilan akan dimungkinkan.

Tentang aborsi juga bukan hal yang sederhana, mungkin aborsinya sukses, tetapi apakah rasa berdosa karena pembunuhan janin dengna mudah bisa hilang. Jawabnya tidak. Pada sisi lain, jika aborsi dilakukan dengan cara yang beresiko, bukan hanya janin yang mati, bahkan ibunya bisa juga meninggal. Lahirnya anak yang merepotkan orang tua sampai anak lahir cacat karena percobaan aborsi sering terjadi.

Tentang keterpaksaan dan ketidakberdayaan para korban kekerasan seks, penyikapannya bisa dengan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang bisa meminimalkan terjadinya kekerasan seks.

Dalam kesehatan reproduksi diajarkan: yang baik atau benar seperti apa; bersikap dewasa, yaitu bertanggung jawab terhadap pilihannya; dan bisa memilih pilihan yang lebih baik.

Para TKI sang pemberani yang kadang disebut pahlawan penghasil devisa perlu kita dukung supaya menjadi pribadi dan keluarga yang sukses. Sukses memperbaiki ekonomi keluarga, bahtera keluarga utuh, terbebas dari masalah terkait seks yang dampaknya merugikan. (*)

Menaker: TKI yang Serbu China, Bukan TKA China yang Serbu Indonesia

ANDRI DONNAL PUTERA Kompas.com - 23/04/2018, 20:06 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri membantah pernyataan sejumlah pihak yang menyebut tenaga kerja asing (TKA) asal China telah menyerang atau menyerbu Indonesia.

Hal ini diungkapkan sebagai jawaban dari kekhawatiran sejumlah pihak terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, di mana disebut banyak TKA asal China yang masuk ke Indonesia.

"Bukan (tenaga kerja) China yang menyerang kita, kita yang menyerang China," kata Hanif dalam diskusi Forum Merdeka Barat 9 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2018).

Hanif merujuk pada data World Bank dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri per akhir tahun 2017. Dari data tersebut, ada total 9 juta TKI di beberapa negara, dengan sebaran paling banyak di Malaysia (55 persen), disusul Saudi Arabia (13 persen), China (10 persen), Hongkong (6 persen), dan Singapura (5 persen).

Bila dirinci lebih detail lagi, ada lebih dari 150.000 TKI di Hongkong, 20.000 TKI di Makau, serta 200.000 TKI di Taiwan. Sementara, jumlah TKA asal China yang bekerja di Indonesia per akhir 2017 hanya 24.800 orang.

Hanif mengaku sudah sering menjelaskan hal ini dalam setiap kesempatan untuk membantah anggapan Indonesia banjir TKA, terutama yang berasal dari China. Namun, respons pihak yang diberi penjelasan masih sulit untuk menerima hal tersebut, bahkan cenderung menolak fakta dari data yang dibawakan.

"Aku harus bagaimana, dikasih datanya marah, dikasih penjelasan marah. Tapi, tidak semua lah, mungkin hanya sebagian saja yang bermain di medsos," tutur Hanif.

Migrant Care: Angin Segar dari UU Perlindungan Migran Mulai Tak Terasa

18 Desember 2018, 17:05:54 WIB

JawaPos.com – Situasi dan kerentanan yang dihadapi buruh migran Indonesia, terutama buruh migran perempuan tak otomatis berhenti ketika pemerintah mengesahkan UU 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) setahun yang lalu. Akses keadilan masih jauh didapatkan oleh mereka.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo yang mencatat masih banyaknya pekerja tersangkut kasus, baik kekerasan, perdagangan manusia atau human trafficking, maupun hukuman mati di luar negeri. Misalnya di Malaysia dan Arab Saudi.

Menurutnya, upaya untuk mengakhiri kerentanan tersebut tidak hanya berlandaskan pada instrumen legal semata, namun juga mensyaratkan adanya perubahan paradigma tata kelola perlindungan buruh migran, pelibatan proaktif semua pemangku kepentingan, serta implementasi konkrit politik luar negeri yang memprioritaskan pada perlindungan WNI.

“Angin segar yang sempat terhembus oleh terbitnya UU 18/2017 mulai tak terasa ketika pemerintah berjalan sangat lambat untuk menjalankan mandat membuat aturan turunannya,” ujarnya dalam konferensi pers dalam rangka memperingati Hari Buruh Migran Sedunia 2018, di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Selasa (18/12).

Selain lambat, dia melanjutkan, pemerintah juga dinilai telah meninggalkan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan aturan tersebut.

Dalam kurun waktu dua tahun sejak diundangkan, saat ini baru satu peraturan menteri (Permen) yang dihasilkan, yakni Permenaker 18/2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

“Saya kira pemerintah harus kerja keras untuk memastikan amanat UU turunan harus benar-benar berjalan karena ternyata di lapangan, tentu UU ini tidak serta merta membalik situasi buruh migran kita,” tegas Wahyu.

Di samping itu, pemerintah juga belum mempunyai skenario masa transisi dari UU 39/2004 menuju UU 18/2017 mengenai pelayanan penempatan ke luar negeri. “Akibatnya hal ini dimanfaatkan dengan praktik prekrutan ugul-ugalan yang membuka ruang terjadinya pidana perdagangan manusia,” kata dia.

Kemudian, kebijakan satu kanal penempatan pekerja rumah tangga (PRT) migran di Timur Tengah oleh Kemenaker semakin memperlihatkan inkonsistensi pemerintah Indonesia ke Arab Saudi. Sebab, di satu sisi masih melanjutkan penghentian permanen, namun di sisi lain membuka ruang penempatan PRT migran melalui kebijakan satu kanal yang disebut sebagai ‘uji coba penempatan’.

“Terminologi ‘uji coba penempatan’ memperlakukan pekerja migran sebagai kelinci percobaan di negara yang tidak menghargai hak asasi pekerja migran,” tandasnya.

Mahasiswi Yogyakarta Dikira TKI, Ditahan Petugas hingga Terlantar di Kupang

KONTRIBUTOR KUPANG, SIGIRANUS MARUTHO BERE Kompas.com - 14/01/2019, 15:05 WIB

KUPANG, KOMPAS.com - Selfina Etidena, mahasiswi Sekolah Tinggi Teologi (STT) Galilea Yogyakarta asal Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), mengalami kejadian kurang menyenangkan di Bandara El Tari Kupang, NTT. Pada 4 Januari 2019 lalu, Selfina ditahan oleh Satgas Anti Human Trafficking NTT di Kupang dan saat ini masih terkatung-katung nasibnya di Kupang. Padahal, dia harus segera kembali ke Yogyakarta untuk memulai proses perkuliahan.

Ditemui sejumlah wartawan pada Senin (14/1/2019) Selfina menceritakan kisahnya. Menurut mahasiswi semester VII tersebut, ia merupakan penumpang transit dari Bandara Mali Alor yang hendak melanjutkan perjalanan ke Surabaya, kemudian ke Yogyakarta. Dia sendiri kembali ke Yogyakarta usai melakukan praktik kerja lapangan (PKL) di Kabupaten Alor. Baca juga: Sebanyak 105 TKI Asal NTT Meninggal di Luar Negeri Sepanjang 2018 Ketika sampai di Bandara El Tari Kupang dan hendak transit, ia ditanyai oleh petugas dari Satgas Anti Human Trafficking mengenai tujuan keberangkatan serta kartu identitasnya.

Sayangnya, Selfina tidak membawa kartu mahasiswa karena kebiasaan di bandara tidak meminta kartu mahasiswa, tetapi hanya KTP dan tiket pesawat. Sementara ijazah PKL sebagai barang bukti sudah dia masukkan ke dalam kopor bersama dan kopor tersebut sudah masuk di bagasi saat check in di counter Lion Air tujuan Kupang-Surabaya. Petugas kemudian memaksa Selfina untuk mengambil ijazah PKL-nya agar bisa meyakinkan petugas. "Bagaimana saya mau ambil, sementara barang bawaan saya ada di dalam bagasi pesawat," kata Selfina.

Merasa masih belum mendapatkan titik terang, petugas kemudian meminta Selfina menelepon rekan mahasiswanya agar bisa membuktikan identitasnya. Selfina pun menyanggupi dan menelepon ketua senat mahasiswa agar berbicara dengan petugas Satgas. Namun petugas itu masih tidak percaya. Dia lalu menyuruh Selfina menelpon ibunya yang ada di Alor untuk berbicara dengan petugas. Lagi-lagi petugas langsung menyatakan bahwa yang ditelepon Selfina bukan ibunya. "Karena mereka interogasi saya sudah berlebihan, sehingga saya menangis. Saya merasa dipermalukan di depan banyak orang dan diperlakukan tidak seperti manusia," katanya.

Dalam kebingungannya, Selfina yang seharusnya segera berangkat justru mendapatkan kenyataan lebih mencengangkan karena keberangkatannya dibatalkan sepihak dan dia harus berurusan dengan Disnakertrans NTT. Selfina kemudian meminta keluarganya datang ke Kupang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia juga mengaku meminta tolong ke teman-temannya di Yogyakarta untuk mengirim foto kartu mahasiswanya via WhatsApp, namun petugas tetap tidak percaya dan bersikeras meminta kartu mahasiswa yang asli.

Selfina ditahan, kantor Disnakertrans NTT didemo Petugas pengamanan Bandara El Tari Kupang, menggelar sweeping terhadap sejumlah kendaraan yang hendak masuk ke area bandara itu, Minggu (24/12/2017)(KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE) Berita penahanan Selfina yang sudah menyebar membuat sejumlah warga Alor melakukan demonstrasi di depan kantor Disnakertrans NTT pada Senin (14/1/2019). Sekitar 100 pemuda yang menggelar aksi menamakan dirinya Aliansi Peduli Kemanusiaan untuk Selvi. Mereka tidak terima pada perlakuan petugas Satgas yang dianggap mengedepankan rasisme ketika menahan Selfina. Mereka mengutuk keras oknum satgas yang mencekal dan menginterogasi Selfina. "Apakah karena kami orang Alor kulit hitam dan rambut keriting sehingga dianggap bagian dari TKI?" kata Sokan Teibang, salah seorang orator dalam aksi itu. Baca juga: Gubernur NTT Ancam Patahkan Kaki Pelaku Perdagangan Manusia di NTT Sokan mengatakan, apa yang dilakukan oknum satgas dan

Disnakertrans NTT sebagai wujud ketakutan pada Gubernur NTT yang memerangi human trafficking.

"Kalian ketakutan sehingga memperlakukan kami orang Alor secara tidak adil. Ingat kami orang Alor bukan bagian dari TKI yang ada dalam pikiran Nakertrans NTT. Buat kami, ada upaya untuk mencari muka kepada Gubernur NTT," lanjutnya.

Aliansi ini juga mendesak Disnakertrans NTT mengakui bahwa mereka telah salah cekat dan mengakui sudah berbuat semena-mena terhadap Selfina. "Kami mendesak Gubernur NTT mencopot Plt Kadis Nakertrans dan membebastugaskan oknum satgas yang terlibat pengekangan ini," ucap Etus Saldena, koordinator aksi. Baca juga: Berkedok Panti Asuhan, Modus Baru Perdagangan Manusia di NTT Aliansi ini juga menuntut Disnakertrans NTT untuk menghapus stigma buruk tentang orang Alor.

Jika tidak mendapatkan tanggapan, aksi ini akan berlanjut ke DPRD NTT hingga ke Gubernur NTT. Bantahan Disnakertrans NTT Ditemui secara terpisah, Plt Kadis Nakertrans NTT Sisilia Sona menegaskan apa yang dilakukan oleh satgas anti human trafficking di Bandara El Tari sudah sesuai prosedur dan ketentuan (protap) yang ada.

"Waktu itu, kami ragukan data dan dokumen dari Selfina, sehingga dicegah keberangkatannya," kata Sisilia. Sisilia menegaskan, pihaknya membantah adanya perlakuan kasar petugas ke Selfina. Misal, merobek tiket keberangkatan atau mengeluarkan kata-kata rasis. "Tidak ada robek tiket dan keluarkan kata-kata rasis," ucapnya.

TKW Mempawah Meninggal di Malaysia, Pemerintah Tutup Mata Biaya Pemulangan?

12 November 2016, 00:53:00 WIB

JawaPos.com - Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Mempawah, Rini Nadila (36), meninggal di Malaysia. Pemulangan jenazahnya terganjal, lantaran keluarganya tidak memiliki uang Rp 20 juta.

Suami Rini Nadila, Suherdani mengaku, dana pemulangan jenazah istrinya sebesar Rp 20 juta diharuskan pemerintah Malaysia.

“Dari pihak penyedia jasa pemulangan jenazah meminta biaya 20 juta kalau dirupiahkan. Kami tidak memiliki dana sebesar itu,” ungkap Suherdani dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group), Sabtu (12/11).

Agar bisa melihat jenazah istrinya, Suherdani melakukan berbagai upaya. Di antaranya berkoordinasi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Mempawah. Dia berharap instansi itu bisa membantu memulangkan jenazah istrinya. Sayangnya, Dinsosnakertrans tidak bisa berbuat apa-apa dengan dalih alokasi seperti itu tidak ada.

“Dinsosnakertrans Mempawah telah menghubungi Dinsos Kalbar. Hasilnya, juga tidak memiliki dana,” keluh Suherdani dengan raut wajah sedih.

Karena ketidakmampuannya, Suherdani sempat pasrah. Dia mengikhhlaskan istri dimakamkan di Malaysia tanpa dihadiri dirinya dan anak-anaknya.

Suherdani mengaku, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia memberitahunya bahwa jasa pemulangan jenazah istrinya sekitar RM5.000. Itu untuk menerbangkan jenazah Rini Nadila dari Kuala Lumpur ke Bandara Internasional Supadio Pontianak. Apabila sampai Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta biayanya RM4.000.

“Saat ini hasil dari rembuk keluarga, kita pulangkan jenazah dengan dana talangan. Jika ada pihak yang ingin membantu dalam bentuk sumbangan atau apapun, nantinya akan kita gunakan untuk menutupi dana talangan itu,” harap Suherdani.

Ketua Konsultasi Pengkajian Bantuan Hukum (KPBH) Mempawah, Mohlis Saka menyayangkan sikap Pemkab Mempawah dan Pemprov Kalbar. Mestinya pemerintah membantu pemulangan jenazah TKW tersebut.

“Inilah peran pemerintah dalam membantu masyarakatnya yang sedang dalam kesulitan,” tegas Mohlis.

“Mestinya pemerintah ikut ambil bagian. Bagaimanapun Rini Dadila merupakan warga Indonesia, warga Kalbar, warga Mempawah. Apabila tidak ada anggaran, pemerintah harusnya mencari solusi. Menurut saya bukan hal yang sulit, jika ada niat baik dari negara untuk rakyatnya,” sambung Mohlis.

Fahri Harusnya Paham, Anak Bangsa Menjadi Babu karena Kemiskinan



Ketua International Migrants Alliance (IMA), Eni Lestari dalam Dialog Publik Menakar Hasil KTT 71 dan Menanyakan Keadilan dan Perlindungan Seperti BM di Kantor PDI, Jakarta, Rabu (23/9/2016). (Simak Jambore)

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) meminta Fahri Hamzah dicopot dari jabatannya. Permintaan itu menyusul kicauan di akun Twitter Fahri yang dianggap menghina TKI.

Melalui keterangan tertulis, juru bicara JBMI Eni Lestari menilai, Fahri Hamzah tidak layak duduk di jabatan tersebut.

Kicauan Fahri pada akun Twitter resminya, @Fahrihamzah, Selasa (24/1/2017), berisi "Anak bangsa mengemis menjadi babu di negeri orang dan pekerja asing merajalela."

"Fahri Hamzah tidak layak menjadi perwakilan rakyat dan buruh migran. JBMI menuntut Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menurunkan Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI," ujar Eni, Rabu (25/1/2017).

Sebagai Ketua Tim Pengawasan TKI, kata Eni, Fahri gagal memahami persoalan mendasar dan solusi yang dibutuhkan buruh migran di luar negeri.

Lebih dari 10 juta buruh migran di luar negeri teraniaya dan telantar karena tidak diakui sebagai pekerja di dalam hukum Indonesia dan di hukum negara penempatan.

Hak-hak buruh migran ditiadakan dan dipaksa hidup di bawah naungan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agen.

Eni menuturkan, sejak 1990, pemerintah memang sudah menarget pengiriman TKI setiap tahun dan menjadikan devisa TKI sebagai andalan pemasukan negara.

(Baca: TKI di Hongkong Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf atas Kicauan di Twitter) Namun, ketika mereka telantar di luar negeri, menuntut pelayanan dan perlindungan, pemerintah belum berupaya maksimal.

"Tetapi, tampaknya kenyataan-kenyataan ini tidak dijadikan perhatian utama Fahri untuk dipecahkan," kata Eni.

"Jika Fahri mempelajari seluk-beluk persoalan buruh migran, tentu dia tahu bahwa anak bangsa menjadi 'babu' di negeri orang karena memang negara gagal mengentaskan rakyat dari kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja layak di dalam negeri," katanya. Selain itu, menurut Eni, pada awal 2017, Fahri juga pernah melontarkan pernyataan yang tidak berlandaskan fakta, merusak reputasi buruh migran, dan menjerumuskan masyarakat.

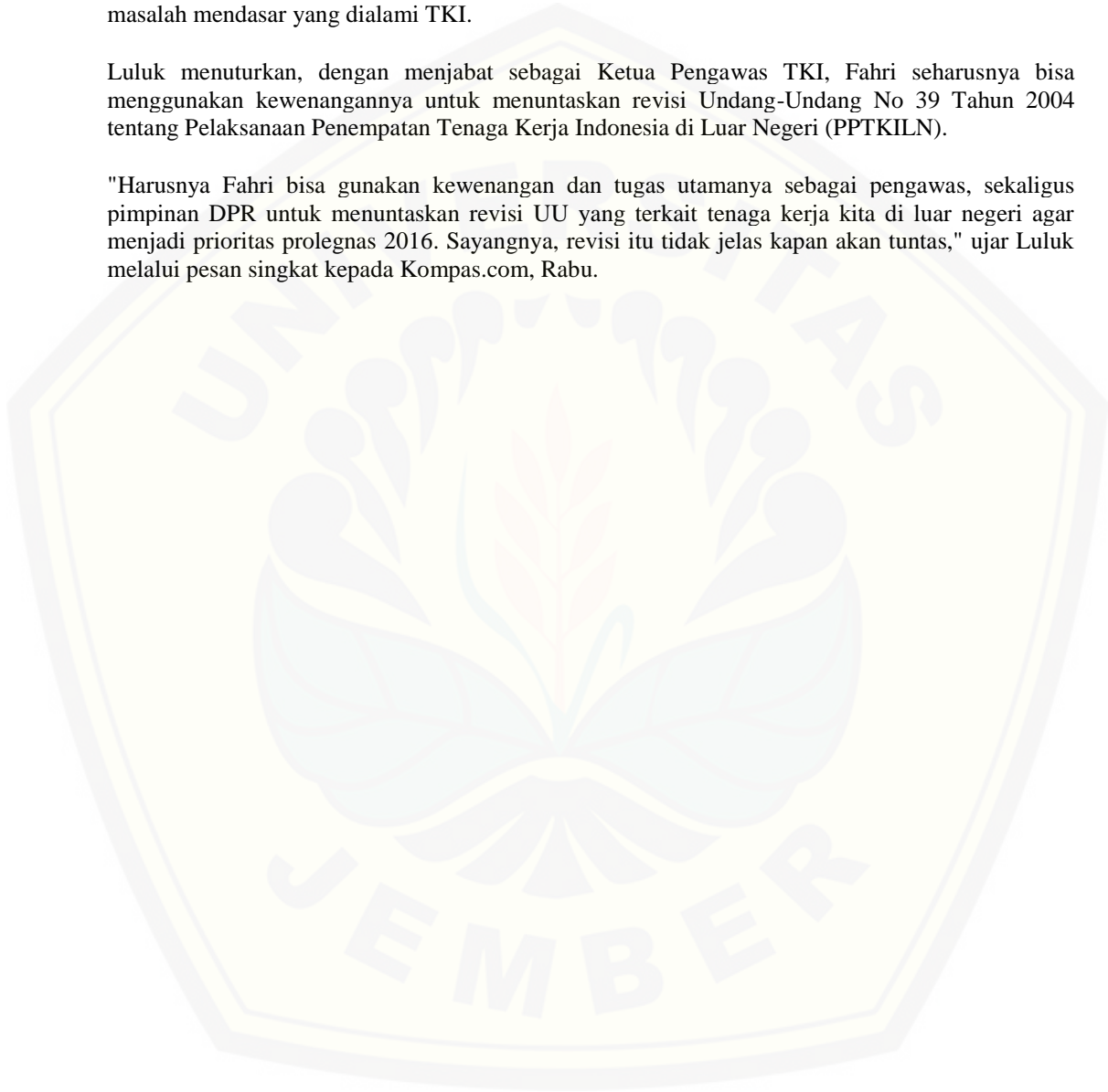
Eni mengutip pemberitaan di media massa online yang memuat pernyataan Fahri yang menyebut 30 persen TKI di Hongkong mengidap HIV.

Sementara itu, LSM PathFinders membantah telah membuat pernyataan bahwa 30 persen dari tenaga kerja di Hongkong mengidap HIV/AIDS.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekjen DPP Perempuan Bangsa Luluk Nur Hamidah. Dia menyesalkan pernyataan Fahri Hamzah yang tidak sensitif dan justru tidak membantu penuntasan masalah mendasar yang dialami TKI.

Luluk menuturkan, dengan menjabat sebagai Ketua Pengawas TKI, Fahri seharusnya bisa menggunakan kewenangannya untuk menuntaskan revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

"Harusnya Fahri bisa gunakan kewenangan dan tugas utamanya sebagai pengawas, sekaligus pimpinan DPR untuk menuntaskan revisi UU yang terkait tenaga kerja kita di luar negeri agar menjadi prioritas prolegnas 2016. Sayangnya, revisi itu tidak jelas kapan akan tuntas," ujar Luluk melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu.



Politikus PDIP Ini Bela Fahri Hamzah Soal "Babu"

25 Januari 2017, 16:53:10 WIB



JawaPos.com - Konotasi kata "babu" yang pakai Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam kicauan di akun twitter pribadinya memang terkesan kasar. Namun, menurut Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka, itu adalah kenyataan bahwa banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri diperlakukan sebagai babu.

"Itulah kenyataannya, hidup jadi begitu kasar dan keras bagi mereka yang jadi babu dan diperlakukan sebagai babu, bukan pekerja," ujarnya melalui pesan singkat, Rabu (25/1).

Rieke menuturkan, sejatinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), orang yang bekerja sebagai pembantu dalam rumah memang disebut sebagai babu. Tentu, babu memiliki perbedaan arti dengan pekerja rumah tangga.

Pembantu atau babu katanya diberikan upah tergantung pemberian majikan, begitupula dengan jam kerjanya. Tawar-menawar pun tidak dijamin norma hukum. Kalau dilanggar, tak ada sanksi bagi yang melanggar, bisa diberhentikan kapan saja, dan tanpa pesangon.

Sementara pekerja rumah tangga yakni mereka yang harus jelas jenjang pendidikan sebagai pekerja, dengan perjanjian dan kontrak kerja yang jelas. Ada kewajiban sebagai pekerja yang harus dipenuhi pekerja dan ada hak-hak sebagai pekerja yang wajib dipenuhi pemberi kerja. Seperti upah, one day off, atau jaminan sosial.

"Selama belum diakui sebagai pekerja formal, ya istilah yang tepat memang babu alias pembantu. Nasib tragis pun bagi babu terjadi di dalam negeri," tegas Rieke.

Karena itu, dia berpendapat bahwa sudah saatnya masyarakat tidak terjebak "eufemisme" atau menghalus-haluskan kata untuk kondisi yang berkebalikan. "Menggunakan kata-kata yang sopan untuk menutupi ketidakadilan yang terjadi," pungkas wanita yang dikenal sebagai pejuang aspirasi buruh itu. (**dna/JPG**)

Cerai Susuk, Cara Perceraian TKW Asal Banyuwangi

KONTRIBUTOR BANYUWANGI, IRA RACHMAWATI Kompas.com - 23/03/2017, 13:57 WIB



Lilit Biati, dosen IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi yang meneliti tentang cerai susuk di Tenaga Kerja Indonesia asal

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Di Kabupaten Banyuwangi dikenal istilah cerai susuk, yaitu proses gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di luar negeri. Hampir sebagian besar, saat terjadi proses cerai susuk, posisi istri sedang bekerja di luar negeri dan mereka membiayai sendiri proses perceraian. Hal tersebut diceritakan Lilit Biati, dosen IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2017).

Lilit dan kedua rekannya melakukan penelitian dengan judul " Cerai Susuk di Kabupaten Banyuwangi, Studi Kasus Dampak TKW Migran terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". "Proses cerai susuk ini sama dengan gugat cerai, yaitu istri yang mengajukan perceraian dan biaya ditanggung oleh pihak istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita," jelas Lilit.

Kata Susuk diambil dari istilah jawa "nyusuk" atau mengembalikan. "Kalau bahasanya orang-orang Banyuwangi, disusuki bojone atau dikembalikan pasangannya. Jadi ya dikenal dengan cerai susuk," jelasnya.

Menurut perempuan berusia 36 tahun ini, ia tertarik meneliti cerai susuk setelah bertemu dengan seorang teman yang bercerita bahwa dia dicerai oleh istrinya yang berada di luar negeri. Padahal dia selama ini mengasuh kedua anaknya sendirian selama istrinya bekerja di luar negeri. Dari penelitian dengan sampel 20 pasangan yang istrinya bekerja sebagai TKW, beberapa kecamatan di Banyuwangi menyumbang angka perceraian banyak antara lain Banyuwangi Kota, Licin, Kalipuro, Rogojampi, Muncar, Glenmore, Kalibaru, Purwoharjo dan Bangorejo.

Lilit mengaku ada tujuh penyebab cerai susuk, salah satunya adalah faktor ekonomi yang diakibatkan keterbatasan suami dalam memberikan nafkah kepada istrinya. Lalu faktor penyebab cerai susuk lainnya adalah penghasilan suami rendah. Suami tidak bekerja dengan alasan merawat anak sehingga menggantungkan hidup dari kiriman istri.

Faktor lain ialah perselingkuhan. Ada juga yang korban fitnah serta campur tangan dari orangtua dan keenganan istri pulang ke tanah air karena sudah nyaman bekerja di luar negeri. "Faktor terakhirnya adalah putus komunikasi antara suami dan istri," jelas Lilit. Cerai susuk biasanya terjadi ketika istri sudah bekerja minimal 3 tahun di luar negeri.

Namun dari tujuh faktor penyebab cerai susuk, menurut Lilit, yang paling dominan adalah faktor suami dengan penghasilan rendah, sehingga ia dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Menurut Lilit, TKW asal Banyuwangi banyak bekerja di Taiwan, Hongkong, Singapura, Malaysia dan Brunai Darussalam.

Hingga September 2016, ada 2.316 tenaga kerja Indonesia asal Banyuwangi, dan sebagian besar didominasi perempuan. "Angka 2.316 itu yang tercatat, padahal jumlahnya yang tidak tercatat lebih banyak," katanya. Jumlah cerai susuk Sementara itu, Lilit juga menjelaskan, data dari Pengadilan Agama Banyuwangi menunjukkan, selama tahun 2016 per September, jumlah cerai talak hanya 740 kasus, sedangkan cerai gugat hampir dua kali lipat, yaitu 1.333 kasus dengan total 2.073 pengajuan.

"Jadi memang 64 persen adalah gugat cerai atau lebih dikenal dengan cerai susuk di Banyuwangi dan cerai talak hanya 26 persen. Bisa dilihat jumlah tenaga kerja Indonesia dan jumlah perceraian di jangka waktu yang sama, angkanya hampir sama. Dan, memang perceraian terbanyak dari tenaga kerja, dan kami simpulkan ekonomi adalah faktor utama TKW migran dan maraknya cerai susuk di Kabupaten Banyuwangi," jelasnya.

Ia mengatakan, semua proses cerai susuk biayanya ditanggung oleh pihak istri yang posisinya masih berada di luar negeri. Biasanya, mereka akan mencari pengacara untuk membantu proses perceraian.

"Jika lancar ya pihak suami tinggal tanda tangan. Tapi kadang juga ada yang nggak mau tanda tangan dan minta sejumlah uang. Angka yang diminta bisa 50 juta," jelasnya. Lilit berharap, dengan penelitiannya tersebut, ada kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi angka perceraian, khususnya bagi TKW asal Banyuwangi.

"Harus ada kebijakan, apalagi saat ini Banyuwangi berada di posisi kedua di Jawa Timur untuk perceraian, dan terbanyak adalah dari tenaga kerja wanita. Termasuk solusi untuk menekan jumlah tenaga kerja asal Banyuwangi yang bekerja ke luar negeri," jelasnya.

Alasan cerai susuk Umi Hanifah (39), warga Kecamatan Gambiran kepada Kompas.com menceritakan dia memutuskan untuk bercerai dengan suaminya, Anton Lasmono setelah mengetahui bahwa sang suami menjalin hubungan dengan perempuan lain. Selain itu, uang kirimannya juga dihabiskan untuk bersenang-senang dan rumah yang rencananya diperbaiki dengan uang kirimannya terbengkalai.

"Saya dikasih tahu sama adek saya sendiri dan kirim foto mantan suami saya dengan perempuan lain. Sakit hati rasanya. Saya kerja jadi pembantu di Singapura selama 4 tahun rasanya sia-sia," kata perempuan yang baru pulang ke tanah air pada Januari 2017 lalu. Ia kemudian meminta bantuan rekannya yang ada di Banyuwangi untuk mencari pengacara untuk membantu perceraian.

"Waktu itu suami saya minta uang 10 juta, ya sudah saya kasih, yang penting saya bisa pisah. Percuma juga dipertahankan. Anak-anak ikut saya sekarang dan itu alasan saya pulang," jelasnya. Ia mengatakan, cerai susuk menurutnya adalah solusi terbaik daripada sakit hati karena merasa dikhianati. Namun hal berbeda dialami dengan Hariri (37), warga Kecamatan Muncar.

Kepada Kompas.com ia bercerita tiba-tiba saja diminta untuk tanda datangan surat cerai, padahal ia merasa hubungannya dengan sang istri yang bekerja di Taiwan baik-baik saja. "Istri saya menganggap saya nggak bisa memenuhi kebutuhan dia, padahal saya juga kerja walaupun jadi buruh bangunan. Tapi nggak apa-apa saya tanda tangan saja dan minta anak-anak tetap sama saya, kan dia masih di Taiwan. Saya bilang sama keluarga kalau saya disusuki sama istri saya. Mau gimana lagi," katanya.

Pulang Jadi TKW, Jilbab Dilepas, Gayanya Sudah Kalahkan Syahrini

25 Desember 2015, 23:17:00 WIB



Pulang Jadi TKW, Jilbab Dilepas, Gayanya Sudah Kalahkan Syahrini (Radar Surabaya/JawaPos.com)

Tidak selamanya katak dalam tempurung akan selalu lugu dan penurut. Jika sudah mengenal dunia luar, sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada sikap dan perilakunya.

Seperti yang terjadi pada Sephia, 42. Sejak pulang dari Korea, istri Donwori, 46, ini jadi berubah seribu persen. Wuikkk...

BISA jadi keputusan Donwori mengizinkan istrinya, Sephia, merantau ke Negeri Gingseng pada lima tahun yang lalu akan menjadi keputusan yang paling disesali seumur hidupnya.

Pasalnya gara-gara merantau ke Korea Selatan, saat pulang ke kampung halaman di Tambaksari, Donwori sudah tak pernah lagi menemukan istrinya yang seperti dulu.

Sephia yang dulu dikenal sebagai perempuan taat dan penurut, suka menutup aurat dan penuh sopan-santun, sekarang sudah berbeda.

Selain suka pakai kaos dan celana ketat, Sephia kemana-mana sekarang tak pernah lepas dari smartphone, tas bermerk dan make up tebal cenderung menor ala artis di televisi.

“Wis, pokoknya kayak nggak kenal lagi. Anak-anaknya saja sudah nggak yakin itu ibu mereka atau bukan. Sekarang gayanya sudah ngalah-ngalahi Syahrini,” tutur Donwori saat menunggu sidang di Pengadilan Agama (PA) Surabaya di Jalan Ketintang Madya seperti yang dilansir Radar Surabaya (Jawa Pos Group), Jumat (25/12).

Bagaimana tidak. Jika dulu Sephia menutup auratnya dengan jilbab sampai dibawah dada, saat ini bahkan tidak ada selebar kain pun yang menutup kepalanya.

Alih-alih jilbab, justru rambut berkilau warna kuning pirang yang terlihat.

Kini bukan hanya Donwori yang bisa melihat aurat istrinya. Tapi, setiap orang kini juga bisa menikmati aurat istrinya tersebut. Apalagi Sephia sekarang sudah buka jilbab dan suka memakai pakaian serba minim.

“Saya shocknya bukan main. Waktu jemput di Bandara Juanda, saya sempat ndak tahu kalau dia itu istri saya. Baru ketika dia njawil pundak dan menyapa duluan, saya jadi ngeh kalau itu memang istri saya,” kata pria yang berprofesi sebagai teknisi bengkel ini.

Melihat keanehan itu, Donwori dan ketiga anak-anaknya sempat menanyakan perubahan itu kepada Sephia. Sebab kemungkinan Sephia sewaktu di Korea mengalami traumatik atau hal-hal lain yang membuatnya berubah sedrastis itu. Namun, jawabannya selalu tidak ada.

Apalagi setelah ke luar rumah, Sephia jadi terlihat genit.

“Wong orang yang di bengkelku juga digoda. Waktu tak tegur, dia malah ngelawan. Katanya itu adalah caranya untuk bergaul. Padahal dulu nggak pernah seperti itu, sekarang sudah kayak wanita kegatelan,” tandasnya.

Termasuk saat Donwori mengancam akan menceraikannya, Sephia ternyata malah menantang. Mentang-mentang tabungan dan investasinya ke orang tuanya juga sudah banyak, dengan terang terangan Sephia malah menantang Donwori untuk menceraikan dirinya.

Sephia malah mengaku kalau dia sengsara dan tertekan kalau meneruskan rumah tangganya dengan Donwori. “Sekarang ngomongnya begitu, nggak ingat blas dulu gimana. Dulu memang hobinya ngaji, sekarang sukanya ngajakin nonton drama Korea,” pungkas Donwori. (*/**jay**)

Merasa Penghasilan Lebih Tinggi, Banyak TKW Ponorogo Minta Cerai

KONTRIBUTOR MADIUN, MUHLIS AL ALAWI Kompas.com - 31/10/2016, 17:08 WIB

PONOROGO, KOMPAS.com - Tiga tahun terakhir, Pengadilan Agama Ponorogo kebanjiran permohonan gugat cerai dari ibu rumah tangga yang berlatar belakang tenaga kerja wanita luar negeri.

Para TKW menggugat suaminya mulai dari karena persoalan ekonomi hingga kasus perselingkuhan. Pejabat Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi kepada Kompas.com mengatakan, dari 2000-an kasus perceraian yang ditangani, empat puluhan persen penggugatnya berlatar belakang profesi tenaga kerja wanita luar negeri.

Para TKW menggugat cerai suaminya lantaran berbagai motif. "Bahkan kasus perceraian yang berlatar belakang profesi tenaga kerja luar negeri, Ponorogo menduduki rangking ketiga se-Indonesia," kata Abdullah.

Ia menyebutkan, motif ekonomi banyak menjadi alasan perceraian. Kebanyakan TKW sudah memiliki banyak tabungan dengan gaya hidup perkotaan. Sementara saat pulang ke kampung halaman, TKW melihat kondisi suaminya bekerja ala kadarnya.

Para TKW yang merasa memiliki penghasilannya jauh lebih tinggi daripada suaminya akhirnya menggugat cerai. Motif kedua terkait persoalan perselingkuhan yang melanda suami ataupun TKW itu sendiri. Biasanya, para TKW menggugat cerai suaminya lantaran saat pulang ke kampung halaman mereka mendapati pasangannya sudah punya selingkuhan.

Sebaliknya, kasus perselingkuhan antara TKW dan tenaga kerja pria di luar negeri juga dijumpai dalam kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Ponorogo. Biasanya, kasus perselingkuhan antara tenaga kerja luar negeri diawali saat saling curhat pada masa liburan.

"Kalau kasus seperti ini banyak dijumpai TKW yang bekerja di Hongkong dan Taiwan. Kalau di dua negara itu, informasinya majikan memberikan waktu liburan bagi tenaga kerja. Sehingga kesempatan itu kerap digunakan antar TKW dan tenaga kerja pria bertemu saling berbagi cerita," ujar Abdullah.

Untuk data perceraian, Abdullah menyebutkan tahun 2013, Pengadilan Agama Ponorogo menangani 1.837 kasus, 2014 sebanyak 2.091 kasus, 2015 sebanyak 2.015 kasus perceraian.

Anak TKW asal Ponorogo Banyak Menikah di Bawah Umur

KONTRIBUTOR MADIUN, MUHLIS AL ALAWI Kompas.com - 27/10/2016, 14:09 WIB

PONOROGO, KOMPAS.com - Kasus pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Ponorogo empat tahun terakhir terus meningkat. **Ironisnya, pernikahan dini di bawah umur banyak menimpa anak-anak yang ditinggal ibunya bekerja di luar negeri. (posisi penulis)**

Pejabat Humas Pengadilan Agama Ponorogo, Abdullah Shofwandi yang ditemui Kompas.com, Kamis (27/10/2016) mengatakan (Pemosisian subjek), 90 persen orangtua mengajukan permohonan anak menikah di bawah umur ke pengadilan agama lantaran anaknya sudah hamil duluan.

Kebanyakan anak perempuan hamil terjadi pada ibu kandungnya yang bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (pemosisian objek). Kondisi itu mengakibatkan pengawasan pergaulan anak perempuannya tidak maksimal.

Abdullah mencontohkan beberapa kasus anak perempuan yang masih di bawah umur berhubungan badan dengan lawan jenis di rumahnya sendiri.

Peristiwa itu terjadi karena ibu kandung anak perempuan berada di luar negeri dan bapaknya sibuk dengan urusan pekerjaan. Tak adanya perhatian dan pengawasan anak-anak perempuan dari orangtua menjadikan mereka bergaul bebas.

Dampaknya, banyak kasus kehamilan di luar nikah melanda anak-anak di bawah umur. Abdullah menuturkan, pernikahan dini bagi anak di bawah umur dapat sah dilakukan jika ada izin dari Pengadilan Agama.

Untuk itu, kedua orangtua dari pihak laki-laki dan perempuan harus mengajukan permohonan sebelum dinikahkan di kantor urusan agama.

"Biasanya petugas KUA akan menolak permohonan nikah anak di bawah umur kalau belum ada izin dari Pengadilan Agama," kata Abdullah.

Ia menambahkan, data empat tahun terakhir di Pengadilan Agama Ponorogo menyebutkan, permohonan pernikahan anak di bawah umur (dispensasi kawin) mencapai ratusan orang.

Rinciannya, pada tahun 2013 sebanyak 124 pemohon; tahun 2014 sebanyak 124 pemohon, 2015 berjumlah 92 pemohon dan; tahun 2016 hingga akhir Oktober mencapai 91 pemohon.

"Kebanyakan umurnya masih 13,14 hingga 15 tahun," jelas Abdullah. **Tingginya pernikahan anak di bawah umur menjadi keprihatinan tersendiri bagi kalangan orangtua. (pemosisian pembaca)**

Saat proses persidangan berlangsung, hakim tak lupa memberikan wejangan kepada keluarga dan anak yang hendak dinikahkan.

91 Orang Pilih Jadi TKW dan Mangkir Ikut UN

KONTRIBUTOR KENDAL, SLAMET PRIYATIN Kompas.com - 14/04/2015, 12:18WIB



Peserta UN di Kendal. Kompas.com/slamet priyatin (94-11)

KENDAL, KOMPAS.com - Sebanyak 91 peserta Ujian Nasional (UN) kejar Paket C di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, tidak ikut ujian karena menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Mereka pun dinyatakan tidak lulus, dan harus mengulang kembali pada kesempatan yang akan datang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, Muryono, para TKW itu sebenarnya sudah tercatat sebagai peserta UN kejar Paket C. Namun, beberapa bulan lalu, mereka pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW.

“Ada juga beberapa, yang tidak bisa ikut UN kejar Paket C, karena melahirkan dan mempunyai bayi. Tapi sebagian besar jadi TKW,” kata Muryono, Selasa (14/4/2015).

Muryono menjelaskan, peserta UN kejar Paket C tercatat ada 1.001 orang. Waktu UN digelar pada sore hari. Hal ini dilakukan supaya peserta yang sudah bekerja, bisa mengikuti UN tanpa mengganggu pekerjaannya.

“Peserta UN kejar paket C, hampir semuanya adalah pekerja dan ibu rumah tangga,” ujar dia. Sementara itu, Bupati Kendal Widya Kandi Susanti, menegaskan warga Kendal minimal harus berijazah setara SMA.

Untuk itu, bagi yang belum mempunyai ijazah setara SMA, Widya meminta mereka mengikuti program kejar paket C.

“Kalau ada peserta kejar Paket C, tidak ikut UN karena tidak diperbolehkan perusahaan tempatnya bekerja, laporkan ke saya. Saya akan menindak perusahaan itu,” kata Widya.

Suami Kesepian Ditinggal Istri Jadi TKW, Anak Kandung Digarap

14 Desember 2015, 07:15:00 WIB



JawaPos.com - Sf (41), warga Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, tega memerkosa anak kandungnya Nr (18). Selama dua bulan korban digagahi tersangka sebanyak lima kali.

Radar Cirebon (Jawa Pos Group) melansir, aksi tersangka akibat kesepian karena istrinya menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Tersangka mulai membujuk rayu putrinya yang serumah untuk melampiaskan nafsu berahinya di bulan Oktober 2015 lalu.

Karena terus dirayu dan dipaksa, korban pun tidak berdaya. Sejak itulah hingga November 2015, korban harus melayani nafsu bejat ayahnya layaknya hubungan suami istri. Kasus ini terungkap ketika korban menceritakan apa yang dialaminya kepada ibu kandungnya.

Kaget bercampur marah mendengar cerita dari sang anak, korban ditemani ibu kandungnya mendatangi Polsek Gebang, Kabupaten Cirebon, Selasa (18/12) lalu. Laporan itu langsung ditindaklanjuti polisi dengan mencari tersangka.

Tanpa perlawanan, Sf pun berhasil dibekuk polisi saat berjualan pecel lele di Desa Gebang, Jumat (11/12) sore. Guna penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut, tersangka digiring petugas Unit Reskrim ke Mapolsek Gebang.

“Tersangka telah bercerai dengan ibu kandung korban. Sedangkan istrinya (yang kedua, red) bekerja di luar negeri sebagai TKW,” ungkap Kapolsek Gebang AKP Soemedi, Minggu (13/12).

Mantan KA SPKT Polresta Cirebon ini mengatakan, tersangka akan dijerat pasal berlapis. Tersangka dikenai Pasal 294 KUHP tentang Pencabulan dan Pasal 285 tentang Perkosaan serta Undang-undang perlindungan anak. **(den/hsn/JPG)**